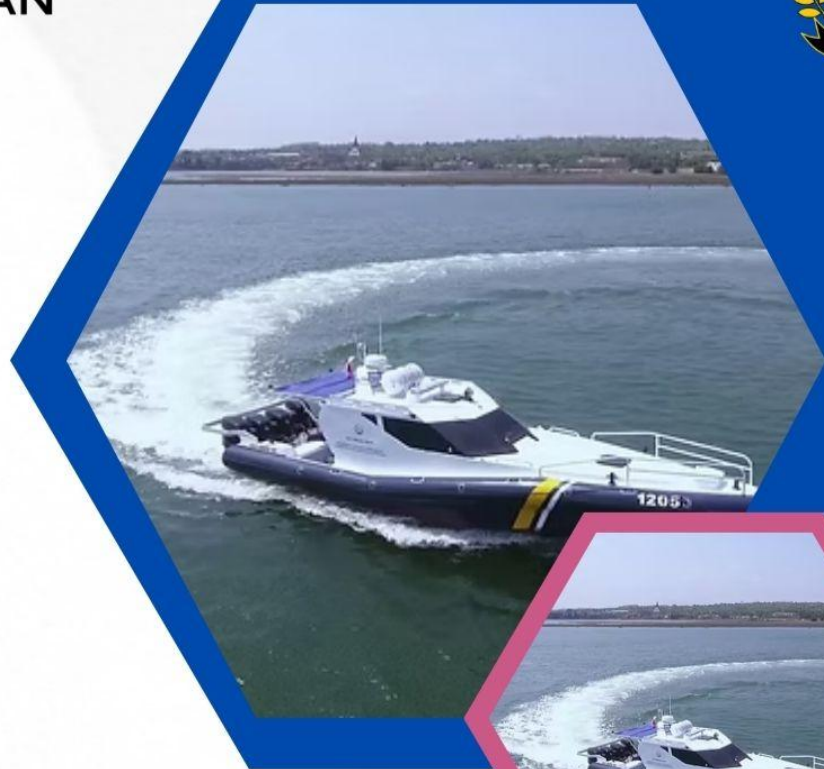




**KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN**



LAPORAN KINERJA PANGKALAN PSDKP TUAL

TRIWULAN I

TAHUN 2026

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Kata Pengantar

Syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nyalah Laporan Kinerja (Lkj) Triwulan I Tahun 2026 dapat terselesaikan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) di triwulan I Tahun 2026 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2026 Unit Pelaksana Teknis Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual (UPT Pangkalan PSDKP Tual)

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada UPT Pangkalan PSDKP Tual dalam kurun waktu Triwulan I Tahun 2026. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Kami berharap, Laporan ini dapat menjadi media pertanggung jawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staff UPT Pangkalan PSDKP Tual dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi yang telah tumbuh dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Tual, 17 April 2026

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Tual



Erik Sostenes, S.St.Pi, M.Si

NIP. 198509162007011006

Ikhtisar Eksekutif



Laporan Kinerja (LKj) UPT Pangkalan PSDKP Tual triwulan I Tahun 2026 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen. PSDKP Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Kinerja Tahunan 2026 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Penyusunan LKj pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama triwulan I tahun 2026.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, UPT Pangkalan PSDKP Tual telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2026 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), juga ditujukan untuk:

1. Menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*continuous improvement*)
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Sasaran Program UPT Pangkalan PSDKP Tual bermuara pada 8 Sasaran Kegiatan , yaitu:

1. Terselenggaranya pembinaan pokmaswas secara efektif;
2. Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif;
3. Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan;
4. Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan;
5. Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif;
6. Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan;
7. Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan;
8. Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Program, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada Tahun 2026, terdapat 21 Indikator Kinerja yang menjadi komitmen kinerja UPT Pangkalan PSDKP Tual dengan nilai NKO 114,83. Selama triwulan I Pangkalan PSDKP Tual telah melakukan perhitungan atas capaian 8 indikator kinerja, dimana



13 indikator lainnya belum dilaksanakan perhitungan dan baru akan dihitung ketika semester 1 ataupun tahunan sebagaimana mekanisme penilaian terhadap indikator kinerja dimaksud. Berikut capaian atas 8 indikator kinerja:

1. Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha kelautan;
2. Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha perikanan;
3. Indeks operasi kapal pengawas (indeks)
4. Indeks operasi speedboat pengawas (indeks)
5. Indeks peneraan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan;
6. Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauansumber daya kelautan dan perikanan;
7. Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko Pangkalan PSDKP Tual;
8. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan;
9. Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual.

Realisasi anggaran pada triwulan I Tahun 2026 yang telah dicapai oleh Pangkalan Pengawasan SDKP Tual sebesar 19,07 % atau sebesar **Rp7,419,933,574** (*tujuh miliar empat ratus Sembilan belas juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah*) dari alokasi anggaran Rp**38,899,623,000,-** (*Tiga puluh delapan miliar delapan ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah*), dimana pada tahun 2026 sumber dana merupakan rupiah murni berbeda dengan tahun 2025. melalui laporan kinerja triwulan I tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja guna mendorong pencapaian target pada tahun berikutnya.



Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vii
BAB I	9
PENDAHULUAN.....	9
A. Latar Belakang	9
B. Maksud dan Tujuan	10
C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	10
D. Data Umum Organisasi	11
E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	15
BAB II	16
PERENCANAAN KINERJA	16
A. Kegiatan Pengawasan SDKP.....	16
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	16
C. Pengukuran Capaian Kinerja	18
BAB III	19
AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2025.....	20
1. Capaian Sasaran Kegiatan Pangkalan PSDKP Tual Triwulan I Tahun 2026	20
2. Capaian Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2026 Tahunan.....	20
B. Analisis Pencapaian Kinerja	22
1. Sasaran Kegiatan 3: Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	22
2. Sasaran Kegiatan 4: Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	28
3. Sasaran Kegiatan 5: Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	37
4. Sasaran Kegiatan 6: Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	48
6. Sasaran kinerja 8: Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	54
C. Realisasi Anggaran	60
BAB IV	61



PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran dan Rekomendasi	61



Daftar Tabel

Tabel 1 Data Armada.....	14
Tabel 2. Komposisi Pegawai Pangkalan Pengawasan SDKP Tual berdasarkan Unit Kerja.....	15
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2026.....	17
Tabel 4 Capaian Kinerja Pangkalan PSDKP Tual Triwulan I Tahun 2026.....	20
Tabel 5 Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Tual Triwulan I Tahun 2026.....	21
Tabel 6 Pemeriksaan Nilai Tahapan SDK.....	24
Tabel 7 Pemeriksaan Nilai Katagori SDK.....	24
Tabel 8 Capaian IK 4.....	24
Tabel 9 Rekapitulasi pengawasan SDK.....	24
Tabel 10 Rekapitulasi pengawasan pemanfaatan ruang laut.....	26
Tabel 11 Rekapitulasi pengawasan pencemaran.....	26
Tabel 12 Pemeriksaan Nilai Tahapan SDP.....	28
Tabel 13 Capaian IK 5.....	30
Tabel 14 Rekapitulasi penerbitan SLO triwulan I per lokasi.....	31
Tabel 15 Rekapitulasi penerbitan SLO triwulan I per bulan.....	32
Tabel 16 Rekap pengawasan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan.....	32
Tabel 17 Rekap pengawasan budidaya.....	33
Tabel 18 Rekap pengawasan pengolahan hasil perikanan.....	34
Tabel 19 Rekap jenis ikan yang dilindungi.....	34
Tabel 20 Capaian IK 6.....	40
Tabel 21 Rekap Perhitungan IK 6.....	41
Tabel 22 Capaian IK 9.....	45
Tabel 23 Rekap Perhitungan IK 9.....	46
Tabel 24 Realisasi Armada Speedboat Pangkalan PSDKP Tual.....	47
Tabel 25 Capaian IK 10.....	50
Tabel 26 Rekap pengenaan sanksi administratif non SPKP.....	51
Tabel 27 Rekap pengenaan sanksi administratif SPKP.....	52
Tabel 28 Capaian IK 10.....	53
Tabel 29 Rekapitulasi SPKP.....	53
Tabel 30 Capaian IK 16.....	53
Tabel 31 Capaian IK 17.....	55
Tabel 32 Capaian IK 18.....	58
Tabel 33 Saran dan Rencana Tindak Lanjut atas pencapaian kinerja Pangkalan PSDKP Tual Periode Triwulan I 2026.....	60



Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Tual	13
Gambar 2 Wilayah Kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Tual.....	13
Gambar 3 Sistematika Penyusunan LKj Pangkalan PSDKP Tual.....	15
Gambar 4 Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) Pangkalan PSDKP Tual.....	19
Gambar 5 Dokumentasi Pengawasan Ruang Laut	25
Gambar 6 Dokumentasi Pengawasan Pencemaran.....	25
Gambar 7 Pengawasan Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan.....	32
Gambar 8 Pengawasan budidaya	32
Gambar 9 Pengawasan pengolahan hasil perikanan	33
Gambar 10 Pengawasan jenis ikan yang dilindungi.....	35
Gambar 11 Gelar Operasi Kapal Pengawas.....	40
Gambar 12 Gelar Operasi Speedboat Pengawas.....	45



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan dan pengelolaan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja (LKj) triwulan I, UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual Tahun 2026 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah diseminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Pangkalan Pengawasan SDKP Tual untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Perjanjian Kinerja.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan "*good governance*".



B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2026 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP setiap Tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

2. Tujuan :

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap Tahun, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.

C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP di Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Tual, antara lain:

1. Bidang Perikanan Tangkap

- a. Masih terdapat kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI);
- b. Kegiatan *transshipment* yang dilakukan kapal-kapal tidak sesuai mitra yang tercantum pada dokumen perizinan;
- c. Kapal perikanan yang melakukan migrasi perizinan belum sepenuhnya melengkapi armada penangkapan dengan VMS;
- d. Terdapat kapal perikanan yang memiliki perizinan yang tidak sesuai dengan wilayah operasi;
- e. Kegiatan *destructive fishing* baik pengeboman dan pembiusan yang masih sering terjadi serta minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait jenis ikan yang dilindungi;
- f. Sering terjadi kegiatan operasi penangkapan ikan yang dilakukan kapal ikan Indonesia (KII) di wilayah perairan Papua New Guinea.

2. Bidang Perikanan Budidaya

- a. Pengangkutan ikan hidup yang tidak terkontrol dengan baik terutama kapal angkut ikan hidup dengan ukuran ≤ 30 GT yang tidak menggunakan VMS;
- b. Masih terdapat pelaku usaha yang belum memiliki perizinan dasar yaitu PKKPR.

3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan

- a. Masih banyaknya UPI yang tidak memiliki SIUP dan SKP;
- b. Terdapat unit usaha yang telah berizin tapi belum melaksanakan aktifitas pengolahan.

4. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

- a. Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom, racun, dan *stroom* serta kejadian kapal kandas yang masih sering terjadi di wilayah konservasi
- b. Eksploitasi mangrove.
- c. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.

D. Data Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan Pengawasan SDKP Tual merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pangkalan PSDKP Tual menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b) Pelaksanaan operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c) Bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d) Penyiapan logistik dan pemeliharaan serta operasi kapal pengawas;
- e) Pelaksanaan penanganan pelanggaran sumberdaya kelautan dan perikanan;
- f) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Pangkalan membawahi Kepala Sub Bagian Umum serta membawahi Kelompok Jabatan Fungsional, dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti berikut :

a. Kepala Pangkalan:

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Kepala Subbagian Umum:

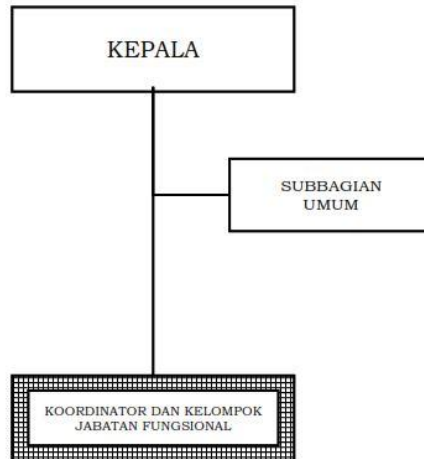
Melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional:

Fungsional Pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.



STRUKTUR ORGANISASI PANGKALAN PSDKP TUAL

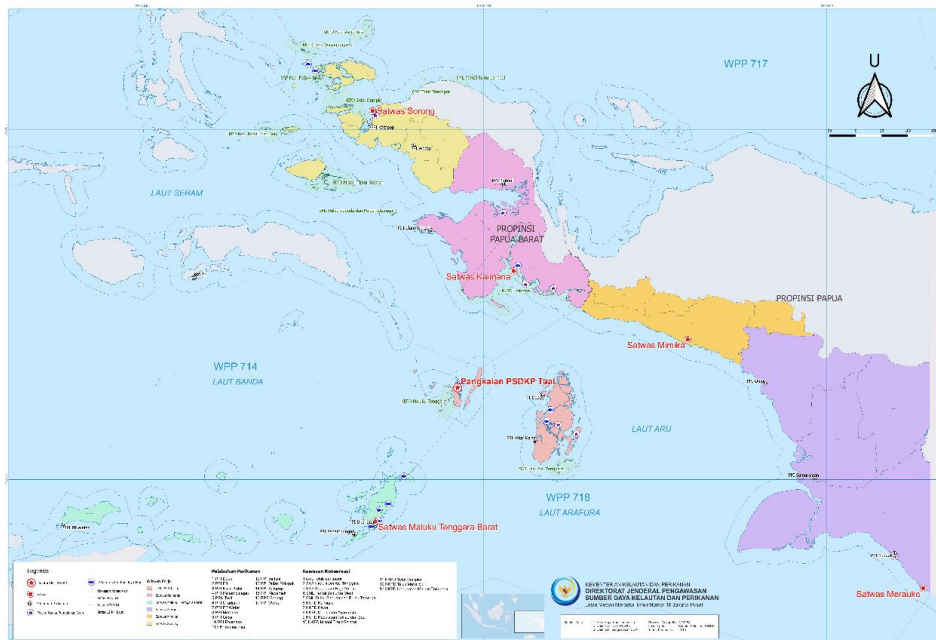


Gambar 1 Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Tual

3. Wilayah Kerja

Wilayah kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Tual meliputi 5 Provinsi (Maluku, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Selatan) dan 3 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yakni WPP 714, WPP 715, WPP 718.

Untuk lebih jelasnya ditunjukkan pada Gambar berikut:



Gambar 2 Wilayah Kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Tual

Dalam pelaksanaan operasional pengawasan, Pangkalan Pengawasan SDKP Tual memiliki satwas dan wilker yang berada dalam kontrol Pangkalan PSDKP sebagaimana dijabarkan di bawah ini:



Pangkalan PSDKP Tual

- Wilker PSDKP Dobo
- Wilker PSDKP Warabal

1) Satuan Pengawasan SDKP Maluku Tenggara Barat (MTB)

- Wilker PSDKP Kisar

2) Satuan Pengawasan SDKP Sorong

- Wilker PSDKP Sorong Selatan
- Wilker PSDKP Raja Ampat

3) Satuan Pengawasan SDKP Kaimana

- Wilker PSDKP Fak Fak
- Wilker PSDKP Wimro / Teluk Bintuni
- Wilker PSDKP Avona

4) Satuan Pengawasan SDKP Mimika

5) Satuan Pengawasan SDKP Merauke

- Wilker PSDKP Wanam
- Wilker PSDKP Asmat

4. Armada Pengawas dan *Speedboat* Pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Tual

Pangkalan PSDKP Tual dalam melaksanakan kegiatan operasi pengawasan SDKP didukung dengan armada kapal pengawas dan *speedboat* pengawas. Berikut data kapal pengawas, *speedboat* pengawas dan RIB dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 1 Data Armada

No	Nama Kapal	Ukuran Kapal	Lokasi / Pangkalan	Kondisi
1.	Hiu 14	32 Meter	Pangkalan PSDKP Tual	Siap Operasi
2.	Hiu Macan 06	36 Meter	Pangkalan PSDKP Tual	Siap Operasi
3.	Sea Rider	8 meter	Pangkalan PSDKP Tual	Siap Operasi
4.	Rubber Boat	5 meter	Wilker Raja Ampat	Siap Operasi
5.	Albacore 002	16 Meter	Pangkalan PSDKP Tual	Siap Operasi
6.	Napoleon 025	12 Meter	Satwas SDKP Mimika	Siap Operasi
7.	Napoleon 042	12 Meter	Wilker Raja Ampat	Siap Operasi
8.	Napoleon 049	12 Meter	Wilker PSDKP Warabal	Siap Terbatas
9	Napoleon 050	12 Meter	Satwas SDKP MTB	Siap Operasi
10	Napoleon 018	12 Meter	Satwas SDKP Sorong	Siap Operasi
11	Marlin 014	6 Meter	Wilker PSDKP Fak Fak	Siap Operasi
12	Jetski 1	3 Meter	Pangkalan PSDKP Tual	Siap Operasi
13	Jetski 2	3 Meter	Pangkalan PSDKP Tual	Siap Operasi

Sumber: Bagian Operasi Armada Pangkalan PSDKP Tual



5. Kepegawaian

Jumlah keseluruhan pegawai Pangkalan Pengawasan SDKP Tual sampai Triwulan I Tahun 2026 sebanyak 140 orang, yang terdiri dari PNS Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP sebanyak 80 orang, 51 orang PPPK dan PJLP sebanyak 13 orang, untuk lebih jelasnya ditunjukkan pada Tabel di bawah:

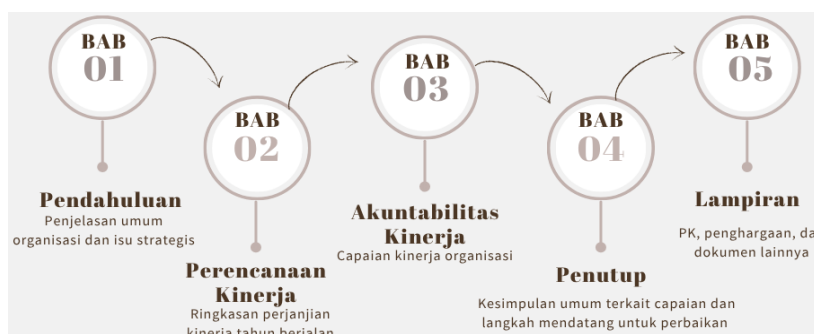
Tabel 1. Komposisi Pegawai Pangkalan Pengawasan SDKP Tual berdasarkan Unit Kerja

No.	Unit Kerja	PNS	PPPK	PJLP	Jumlah
1.	Pangkalan Pengawasan SDKP Tual	25	22	11	58
	- Wilker Pengawasan SDKP Dobo	3	5	-	8
	- Wilker Pengawasan SDKP Warabal	-	-	-	-
2.	Satuan Pengawasan SDKP Sorong	9	3	-	12
	- Wilker Pengawasan SDKP Sor Sel	-	-	-	-
	- Wilker Pengawasan SDKP Raja Ampat	2	1	-	3
3.	Satwas Pengawasan SDKP Merauke	7	2	1	9
	- Wilker Pengawasan SDKP Wanam	-	-	-	-
4.	Satuan Pengawasan SDKP Maluku Tenggara Barat	2	2	-	4
	- Wilker Pengawasan SDKP Kisar	-	-	-	-
5.	Satuan Pengawasan SDKP Kaimana	3	3	1	7
	- Wilker Pengawasan SDKP Wimro	-	-	-	0
	- Wilker Pengawasan SDKP Fak Fak	2	3	-	5
6.	Satuan Pengawasan SDKP Mimika	3	2	-	5
	- Wilker Pengawasan SDKP Asmat	-	-	-	-
7.	KP. Hiu Macan 06	11	3	-	14
8.	KP. Hiu 14	8	3	-	11
9.	KP. Macan Tutul 01	-	1	-	1
10.	Tugas Belajar	3	-	-	3
	Total	80	51	13	140

Sumber: Kepegawaian Sub Bagian Umum Pangkalan PSDKP Tual

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Tual berdasarkan Permen KP nomor 35 tahun 2023 diuraikan sebagai berikut :



Gambar 3 Sistematika Penyusunan LKj Pangkalan PSDKP Tual



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Kegiatan Pengawasan SDKP

Rumusan kegiatan tingkat UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual, yang merupakan turunan dari fungsi eselon II Ditjen PSDKP, meliputi:

- Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada;
- Kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan;
- Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan;
- Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan; dan
- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pangkalan PSDKP Tual.

Selain kegiatan di atas Pangkalan PSDKP Tual juga berperan aktif dan terlibat dalam mendukung program ekonomi biru Menteri kelautan dan perikanan

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾ Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Pangkalan PSDKP Tual telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2026 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:

1. Menerjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*continuous improvement*);
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Indikator Kinerja Pangkalan PSDKP Tual dituangkan dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana tabel berikut;



Tabel 2 Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terselenggaranya pembinaan pokmaswas secara efektif	1. Indeks kualitas pembinaan pokmaswas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (indeks)	83
2.	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2. Nilai Kualitas Operasi intelijen kelautan (nilai)	100
		3. Nilai Kualitas Operasi intelijen perikanan (nilai)	100
3.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4. Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha kelautan (nilai)	83
4.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	5. Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha perikanan (nilai)	83
5.	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6. Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92,25
		7. Indeks operasi speedboat pengawas (indeks)	92,25
		8. Indeks kualitas pemeliharaan dan perawatan sarana/Armada pengawasan SDKP	100
6.	Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	82
		10. Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	82
7.	Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11. Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (indeks)	82
8.	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12. Nilai kinerja perencanaan anggaran satker Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	81,75
		13. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satker lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	92,1
		14. Indeks profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Tual (indeks)	81,5
		15. Penilaian mandiri SAKIP satker Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	88,2
		16. Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko Pangkalan PSDKP Tual (%)	100
		17. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	86
		18. Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	88,8
		19. Nilai pengawasan kearsipan internal Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	81
		20. Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	78
		21. Nilai implementasi program budaya kerja (nilai)	71



C. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual Indikator Kinerja. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Tahunan didukung dengan pengukuran pada aplikasi “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja berbasis informasi teknologi (dapat diakses di www.kinerjaku.kkp.go.id).



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2026

1. Capaian Sasaran Kegiatan Pangkalan PSDKP Tual Triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2026, Pangkalan PSDKP Tual telah menyempurnakan dan menetapkan 8 Sasaran Kegiatan dengan 21 Indikator Kinerja yang terdiri atas 11 IKU dan 10 IKM. Nilai Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Program (NPSS) Pangkalan PSDKP Tual sebesar 114,83% untuk triwulan I.



Sumber: SAPK (kinerjaku.kkp.go.id)

Gambar 4 Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) Pangkalan PSDKP Tual

Rata-rata NPSK diperoleh dari akumulasi penghitungan capaian seluruh sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi kontrak kinerja antara Kepala Pangkalan PSDKP Tual dengan Direktur Jenderal PSDKP. Adapun Nilai setiap sasaran kegiatan merupakan hasil penghitungan atas 8 indikator kinerja utama yang menjadi parameter tercapainya sasaran kegiatan. Capaian masing-masing sasaran kegiatan dan IKU serta IKM pembentuk NPSK akan diuraikan lebih lanjut.

2. Capaian Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2026 Tahunan

Capaian kinerja triwulan I Tahun 2026 mendapat istimewa dengan NPSK dengan kategori baik dengan perolehan diatas 100%. Capaian triwulan I Pangkalan PSDKP Tual ditabulasikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3 Capaian Kinerja Pangkalan PSDKP Tual Triwulan I Tahun 2026

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2026	Target MARET	Capaian MARET	%
SK.01	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif							
IK.01	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	83	0		
SK.02	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif							
IK.02	Nilai kualitas operasi intelijenkelautan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	0		
IK.03	Nilai kualitas operasi intelijenperikanan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	0		
SK.03	Terselenggaranya pengawasan sumber daya Kelautan							
IK.04	Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan Data Dukung1 Data Dukung2	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	83	50	84	120
SK.04	Terselenggaranya pengawasan sumber daya Perikanan							
IK.05	Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan Data Dukung1 Data Dukung2	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	83	60	99,66	120
SK.05	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif							
IK.06	Indeks operasi kapal pengawas Data Dukung1 Data Dukung2	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92,25	89	98,5	110,67
IK.07	Indeks kinerja operasi speedboatpengawas Data Dukung1 Data Dukung2	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92,25	89	97,5	109,55
IK.08	Indeks "kualitas" pemeliharaan dan perawatan sarana/Armada pengawasan SDKP	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	0		
SK.06	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan							
IK.09	Indeks "penerapan" sanksi administratif bidang kelautan danperikanan Data Dukung1 Data Dukung2	Indeks	Maximize	Akumulasi	82	65	100	120
IK.10	Indeks "Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan" sumberdaya kelautan dan perikanan Data Dukung1 Data Dukung2	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82	65	100	120
SK.07	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan							
IK.11	Indeks "Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82	0		
SK.08	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan							
IK.12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pangkalan PSDKP Tual (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81,75	0		
IK.13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satker lingkupPangkalan PSDKP Tual (nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92,1	0		
IK.14	Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Tual	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81,5	0		
IK.15	Penilaian Mandiri SAKIP satkerPangkalan PSDKP Tual	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,2	0		
IK.16	Persentase "Pelaksanaan" "Pengendalian" Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Tual Data Dukung1 Data Dukung2	%	Maximize	Rata-rata	100	100	100	100
IK.17	Persentase "jumlah" rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnyatelah dilengkapi dan disampaikan Data Dukung1 Data Dukung2	%	Maximize	Rata-rata	86	86	86	100
IK.18	Nilai "kepuasan" Masyarakat pengguna layanan "Publik" unit kerja lingkup Pangkalan PSDKPTual Data Dukung1 Data Dukung2	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,8	88,8	98,32	110,72
IK.19	Nilai Pengawasan KearsipanInternal Pangkalan PSDKP Tual	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81	0		
IK.20	Nilai "inovasi" pelayanan "publik" yang diterapkan Pangkalan PSDKP Tual	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	78	0		
IK.21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71	0		

Pada triwulan I tahun 2026 Pangkalan PSDKP Tual dalam aktualisasinya telah melaksanakan penilaian terhadap 9 IK dengan kriteria 3 IK dengan predikat baik, 6 IK dengan predikat istimewa. Pelaksanaan kegiatan dalam pemenuhan IK dimaksud terdapat kendala maupun faktor pendukung yang mendorong tercapainya kegiatan atas IK yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan sepanjang triwulan I tahun 2026. Realisasi anggaran pada triwulan I Tahun 2025 yang telah dicapai oleh Pangkalan Pengawasan SDKP Tual sebesar 19,07% atau sebesar **Rp7,419,933,574,-** (*Tujuh miliar empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima tujuh empat puluh rupiah*) dari alokasi anggaran **Rp38,899,623,000,-** (*tiga puluh delapan miliar delapan ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah*).



Tabel 4 Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Tual Triwulan I Tahun 2026

NO	KODE NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA									TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAIN-LAIN	TRANSFER	
1	440853 PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	PAGU	15.749.674.000	23.069.757.000	80.192.000	0	0	0	0	0	0	38.899.623.000
		REALISASI	3.532.979.483	3.868.472.492	18.481.223	0	0	0	0	0	0	7.419.933.198
		%	22.43%	16.77%	23.05%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	19.07%
		SISA	12.216.694.517	19.201.284.508	61.710.777	0	0	0	0	0	0	31.479.689.802
GRAND TOTAL		PAGU	15.749.674.000	23.069.757.000	80.192.000	0	0	0	0	0	0	38.899.623.000
		REALISASI	3.532.979.483	3.868.472.492	18.481.223	0	0	0	0	0	0	7.419.933.198
		%	22.43%	16.77%	23.05%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	19.07%
		SISA	12.216.694.517	19.201.284.508	61.710.777	0	0	0	0	0	0	31.479.689.802

Sumber data :Myintrees

B. Analisis Pencapaian Kinerja

Triwulan I Tahun 2026 Pangkalan PSDKP Tual telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Analisis pada setiap sasaran kegiatan diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 3: Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan

Sasaran Kegiatan ketiga menghasilkan 1 indikator kinerja utama yang ditetapkan Pangkalan PSDKP Tual yaitu "Nilai pemeriksaan pelaku usaha kelautan (Nilai)".

a. IK 4: Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan (Nilai)

Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan adalah ukuran pelaksanaan tugas dan fungsi pemeriksaan terhadap pelaku usaha kelautan. Nilai pemeriksaan pelaku usaha kelautan merupakan gabungan dari beberapa komponen indikator (*composite index*) yang diukur berdasarkan bobot tertentu. Formula dalam menghitung capaian indikator kinerja nilai pemeriksaan pelaku usaha kelautan dijabarkan sebagai berikut.

$$X = (a \times 0,8) + (b \times 0,2)$$

Keterangan :

X : nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan

a : Nilai pemeriksaan pelaku usaha sesuai ketentuan

b : Nilai tindak lanjut rekomendasi pelaku usaha

Perhitungan pemeriksaan pelaku usaha sesuai ketentuan (a)

$$a = \frac{\sum_{i=1}^n \text{nilai pemeriksaan pelaku usaha}}{\text{jumlah pemeriksaan pelaku usaha (n)}}$$

Tabel 6 Pemeriksaan Tahapan Nilai Sumber Daya Kelautan

No	Tahapan	Nilai	Ouput
1	Persiapan	10	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pengaduan/nota dinas (5) Surat Tugas (5)
2	Pelaksanaan	50	Dokumen Hasil Pengawasan
		20	Tidak Mendapatkan catatan perbaikan dari verifikator Direktorat PSDK
3	Pelaporan	20	Laporan dengan lampiran dokumentasi dan Salinan dokumen perizinan yang disampaikan kepada Direktur PSDK

Perhitungan tindak lanjut perbaikan (b)

$$b = \frac{\sum \text{nilai tindak lanjut rekomendasi}}{\text{jumlah rekomendasi}}$$

Keterangan :

- Pelaku usaha yang mendapat rekomendasi dan menindaklanjuti melalui Surat Pernyataan diberi nilai 100
- Pelaku usaha yang mendapat rekomendasi namun tidak menindaklanjuti diberi nilai 0

Catatan :

Apabila pada periode perhitungan belum ada pelaksanaan maka dibuat sesuai dengan bobot

Kategori nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan:

Tabel 7 Pemeriksaan Nilai Katagori Sumber Daya Kelautan

No	Nilai	Katagori	Deskripsi
1	>85	Sangat Baik	Menunjukkan pengawasan sumber daya kelautan dinilai sangat baik
2	66-85	Baik	Menunjukkan Pengawasan sumber daya kelautan dinilai baik
3	50-65	Cukup Baik	Menunjukkan Pengawasan sumber daya kelautan dinilai cukup baik
4	<50	Tidak Baik	Menunjukkan Pengawasan sumber daya kelautan dinilai tidak baik

Dalam kurun waktu triwulan I 2026 capaian IKU ini berhasil dicapai dengan nilai yang baik yaitu 84, sebagaimana target triwulan yang ditetapkan. Capaian dapat diraih dengan memenuhi tahapan pemeriksaan sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas. Berikut kami tampilkan capaian indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:



Tabel 8 Capaian IK 4

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW I	2026	TW I 2026	s/d TW I	TW I 2025
Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (indeks)	84	50	84	84	100

Dari tabel di atas dapat kita lihat jika capaian kinerja untuk IK Nilai pemeriksaan pelaku usaha kelautan selama triwulan I telah optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan. sehingga IK ini dapat dibandingkan dengan nilai capaian tahun sebelumnya.

Analisa penyebab keberhasilan yang dilaksanakan Pangkalan PSDKP Tual agar mendapatkan capaian yang sempurna dalam memenuhi IKU dimaksud antara lain:

1. Melakukan rapat perencanaan terkait objek pengawasan, sehingga pelaksanaan pengawasan sesuai dengan regulasi yang berlaku;
2. Mengumpulkan informasi pendahuluan, yang bertujuan agar meminimalisir masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan misalnya lokasi unit usaha, transportasi yang akan digunakan, potensi persoalan yang timbul karena pengawasan;
3. Melakukan pemantapan terhadap peraturan yang berhubungan langsung dengan objek pengawasan, dengan internalisasi peraturan maupun kebijakan terbaru yang berkaitan dengan objek pengawasan;
4. Melakukan *sharing session* dengan instansi terkait guna menyamakan persepsi dan penguasaan kondisi terhadap objek pengawasan agar pelaksanaan pengawasan lebih profesional dan bertanggungjawab terutama dalam penentuan luasan wilayah pemanfaatan dalam pengawasan ruang laut;
5. Memenuhi tahapan pelaksanaan sebagaimana yang termuat dalam informasi indikator kinerja, agar pelaksanaan pengawasan terstruktur serta pengukuran kinerja dapat terlaksana.

Analisa kegiatan lain yang menunjang pencapaian yaitu:

1. Briefing rutin yang dilakukan sebagai upaya dalam meneruskan informasi serta teknis pengawasan maupun isu terkini di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual, sehingga distribusi informasi menjadi merata dan pengawasan dapat dilaksanakan dengan optimal;
2. Perencanaan dan penganggaran, kegiatan tersebut erat kaitannya dengan capaian organisasi mengingat alokasi anggaran terhadap kebutuhan pengawasan dan yang



menunjang pengawasan perlu direncanakan dan ditetapkan dengan perhitungan yang sesuai.

Selama triwulan I pengawasan sumber daya kelautan yang telah dilaksanakan yaitu pengawasan ruang laut dan pengawasan pencemaran akibat kegiatan perikanan,realisasi pada kegiatan pengawasan sumber daya kelautan sebesar 5,12% atau sebesar Rp22,117,000 dari total anggaran sebesar Rp432,357,000.

Tabel 9 Rekapitulasi pengawasan SDK

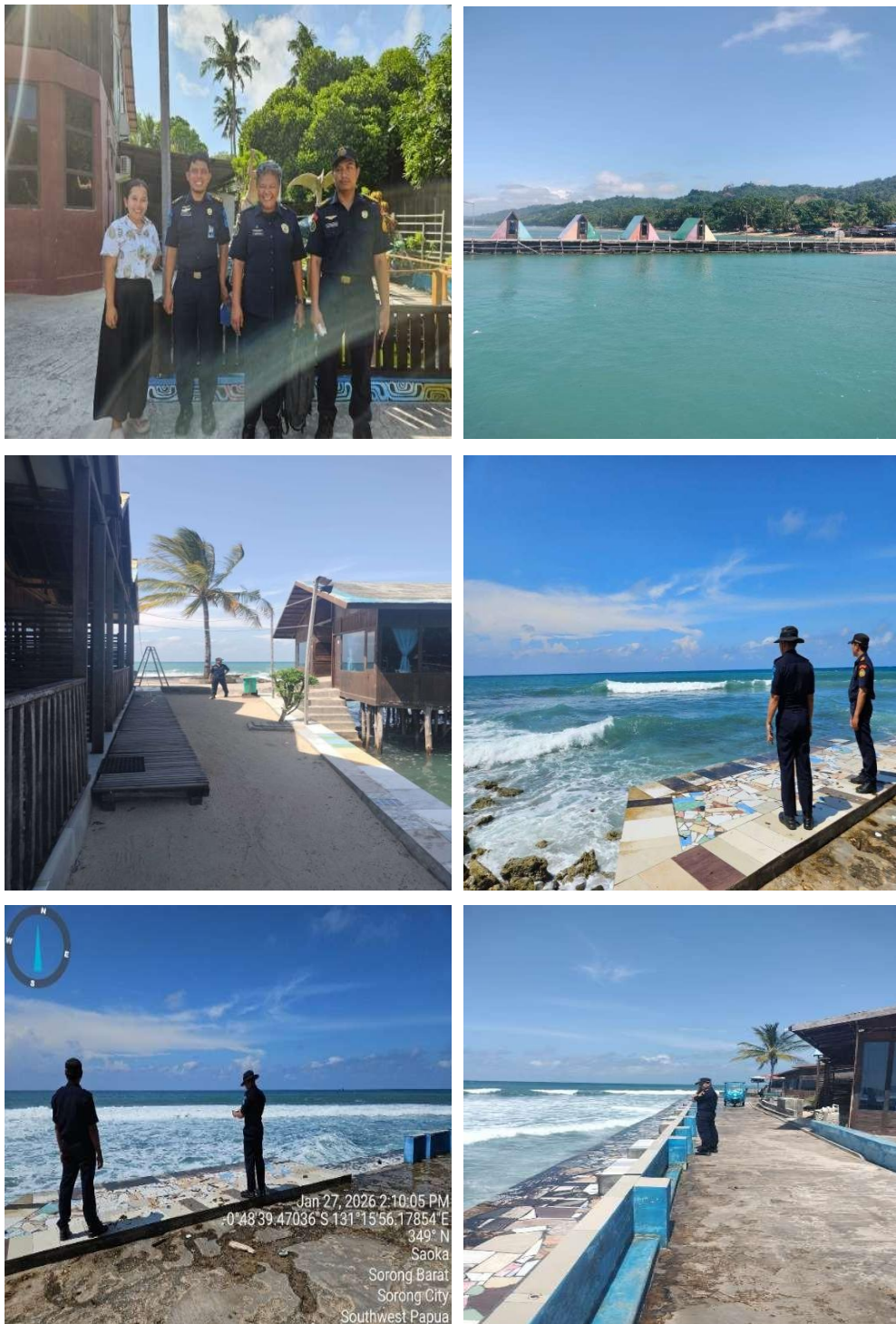
NO.	UPT	JUMLAH UNIT/PELAKU USAHA YANG DI PERIKSA PANGKALAN PSDKP TUAL										JUMLAH PELAKU USAHA		
		KKPN		PWP3K		PRL		INTELJEN		PENCEMARAN		Taat	Tidak Taat	Total
		Taat	Tidak Taat	Taat	Tidak Taat	Taat	Tidak Taat	Taat	Tidak Taat	Taat	Tidak Taat			
1	Pangkalan PSDKP Tual					1						1	0	1
2	Wilker PSDKP Dobo													
3	Sabwas PSDKP Sorong					2				2		4	0	4
4	Wilker PSDKP Raja Ampat													
5	Sabwas PSDKP Merauke													
6	Sabwas PSDKP Kaimana					1						1	0	1
7	Wilker PSDKP Fak - Fak													
8	Sabwas PSDKP Mimika													
9	Sabwas PSDKP Maluku Tenggara													
JUMLAH		0	0	0	0	4	0	0	0	2	0	6	0	6
		0		0		4		0		2		6		6

a.1 Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya

Pencapaian kinerja triwulan I Tahun 2026 diperoleh dari kegiatan Pengawasan terhadap 6 pelaku usaha yang melakukan pemanfaatan terhadap ruang laut. Kegiatan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang laut adalah kegiatan yang tidak berdiri sendiri, dimana PKKPRL adalah perizinan dasar, selama pelaku usaha memanfaatkan ruang laut. pengawasan PKKPRL erat kaitannya dengan pengawasan budidaya dan pengawasan perikanan lainnya sehingga kedudukan perizinan PKKPRL sangat urgent diawasi untuk memastikan kelaikan dokumen lainnya,serta Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Pangkalan PSDKP Tual. Kegiatan pendukung utama pengawasan Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada



sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Pangkalan PSDKP Tual meliputi pengawasan pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan dan non perikanan.



Gambar 6 Dokumentasi Pengawasan Ruang Laut



Tabel 10 Rekapitulasi pengawasan pemanfaatan ruang laut

NO	SURAT TUGAS	TANGGAL PENGAWASAN	LOKASI PENGAWASAN	PELAKU USAHA	Nomor PKKPRL Terbit PKKPRL	URAIAN	KETAATAN		REKOMENDASI
							TAAT	TIDAK TAAT	
I PANGKALAN PSDKP TUAL									
1.	B.409/PSDKPLan.6/KP.440/II/2026	26 Februari 2026	Perairan Desa Tetoat, Kabupaten Maluku Tenggara	PT. Rajawali Laut Timur NPWP: 70.403.324.0-941.000 NIB: 9120200161673 KBL: 03211 Pembesaran Pisces/ikan Bersirip Laut Skala Usaha: Menengah Rendah Status Modal: PMDN	Nomor PKKPRL: 01122210518100011	Berdasarkan hasil pengawasan diperoleh beberapa sebagai berikut : 1. Pemanfaatan Ruang Laut oleh PT. Papua Resort telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2. Telah menyampaikan Laporan Tahunan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) untuk periode terakhir tahun 2025.	√		Kegiatan pemanfaatan ruang laut yang dilakukan oleh PT Rajawali Laut Timur telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pows PWP3K memberikan imbauan agar penyampaian Laporan Tahunan PKKPRL tidak terlambat dan segera menyampaikan laporan pendirian bangunan/installasi di laut kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hidrografi dan oceanografi
II SATUAN PSDKP MALUKU TENGGARA BARAT									
III SATUAN PSDKP SORONG									
2.	B.156/PSDKPLan.6/KP.440/II/2026	27 Januari 2026	PT. Papua Resort Alamat: JL. Obet Mubalus Nomor 999, Desa/Kelurahan Saoka, Kec. Maladum Mes, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat	Nama: PT. Papua Resort Alamat: JL. Obet Mubalus Nomor 999, Desa/Kelurahan Saoka, Kec. Maladum Mes, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat NPWP: 03.082.758.8-951.000 NIB: 023000932444 (24 September 2020) KBL: 55199 – Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya - Pengembangan Wisata Bahari Skala Usaha: Usaha Besar Status Modal: PMA	Dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dengan nomor 30122210519200001, terbit 22 Desember 2022 dengan luas 1,87 Ha dan Kedalaman 4 M.	Berdasarkan hasil pengawasan diperoleh beberapa sebagai berikut : 1. Pemanfaatan Ruang Laut oleh PT. Papua Resort telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2. Telah menyampaikan Laporan Tahunan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) untuk periode terakhir tahun 2025.	√		Pemanfaatan Ruang Laut oleh PT Papua Resort telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
3.	B.369/PSDKPLan.6/KP.440/II/2026	18 Februari 2026	Julian Franco Sutrisno adalah di area pesisir Jl. Panjaitan RT.001/RW.001 Tampa Garam, Distrik Sorong Barat, Kelurahan Klawasi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya	Nama: Julian Franco Sutrisno Alamat: Jl. P.JAYAKARTA46/E-19, Desa Kelurahan Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta NIB: 1803220035271 KBL: 56101 – Restoran, 43120 – Penyajian Lahan Skala Usaha: Usaha Kecil Status Modal: PMDN	Dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dengan nomor 09012310519200002, terbit 09 Januari 2023 dengan luas 3.43 Ha dan Kedalaman 11 M.	Berdasarkan hasil pengawasan diperoleh beberapa sebagai berikut : 1. Pemanfaatan Ruang Laut oleh Julian Franco Sutrisno telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2. Telah menyampaikan Laporan Tahunan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) untuk periode terakhir tahun 2025.	√		Pemanfaatan Ruang Laut oleh Julian Franco Sutrisno telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
IV SATWAS MIMIKA									
V SATWAS PSDKP KAIMANA									
5.	B.129/PSDKPLan.6/KP.440/II/2026	26 Januari 2026	PT Pertamina Patra Niaga Kaimana Alamat : Jl. Utarum Kaki Air Kecil, Desa/Kelurahan Kaimana, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat	Nama: PT Pertamina Patra Niaga Kaimana Alamat : Jl. Utarum Kaki Air Kecil, Desa/Kelurahan Kaimana, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat NPWP: 00.106.115.7-205.1000 NIB: 9120309310613 (01 Maret 2019) KBL: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI PB-UMKU (TERSUS) : 912030931061302660001 Nomor Kegiatan Usaha/NKP : 202301-3019-1525-5105-030 Tingkat Risiko : Tinggi Skala Usaha : Usaha Besar Status Modal : PMDN	Dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dengan Nomor : 21102410519200002, terbit 21 Oktober 2024 dengan luas 10,08 Ha, dan Kedalaman 9 Meter	Berdasarkan hasil pengawasan diperoleh hasil Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yg dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga Kaimana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yg berlaku.	√		Diingatkan kepada PT Pertamina Patra Niaga Kaimana agar menyampaikan Laporan Tahunan Periode II sebelum 21 Oktober 2026
VI WILKER PSDKP RAJA AMPAT									
6.	B.502/PSDKPLan.6/KP.440/III/2026	3 Maret 2026	PT. Jaya Samudera Siantan yang berlokasi di Kampung Bianci Pulau Bianci Distrik Waigeo Kepulauan, kabupaten Raja Ampat	Nama: PT. Jaya Samudera Siantan Alamat : Jl.WR.Supratman, Desa/Kelurahan Air Raja, Kec. Tanjung Pinang Timur,Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau NPWP: 39.690.957.4-214.00 NIB: 1008230034749 KBL: 03211 - Pembesaran Pisces/ikan Bersirip Laut Tingkat Risiko : Menengah Rendah Skala Usaha : - Status Modal : PMDN	Dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dengan Nomor : 18092410519600002, terbit 18 September 2024 dengan luas 0,36 Ha, dan Kedalaman 3 Meter	Dari hasil pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut pada bulan Maret tahun 2026, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1. PT. Jaya Samudera Siantan taat terhadap ketentuan pemanfaatan ruang laut yang ada. 2. Jenis pemanfaatan dan luasan pemanfaatan sesuai dengan perizinan yang dimiliki. 3. PT. Jaya Samudera Siantan telah melakukan laporan tahunan.	√		1. Perlunya sosialisasi peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan peraturan yang wajib ditaati oleh para pelaku usaha dibidang pemanfaat ruang laut. 2. Perlunya kerjasama antar instansi terkait agar penataan pemanfaatan ruang laut yang ada dapat berjalan sesuai ketentuan yang ada.



Tabel 11 Rekapitulasi Pengawasan Pencemaran

NO	TGL PENGAWASAN	LOKASI PENGAWASAN	NAMA PELAKU USAHA	DOKUMEN-DOKUMEN PERIZINAN	PENERBIT IZIN, MASA BERLAKU	IPAL	URAIAN HASIL PENGAWASAN	KETAATAN		REKOMENDASI
								TAAT	TDK TAAT	
A. PANGKALAN PSDKP TUAL										
B. SATWAS SDKP KAIMANA										
C. SATWAS SDKP MTS										
D. SATWAS SORONG										
1.	29 Januari 2026	"PT Fresh On Time Seafood JL.D.I.PANIAITAN, Desa/Kelurahan Tampa Garam, Kec. Maladum Mes, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, 0°49'11.80"S 131°14'55.07"E.	"PT Fresh On Time Seafood	NIB 812000711862	Penerbit OSS	-	"1. PT Fresh On Time Seafood telah melakukan pemenuhan Dokumen pencegahan pencemaran. 2. Tidak ditemukan indikasi pencemaran. 3. Tidak ada indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh PT Fresh On Time Seafood."	Taat		"1.Rekomendasi yang diberikan untuk dilaksanakan oleh PT Fresh On Time Seafood adalah sebagai berikut: 1. Menambah bak pemisah pada instalasi limbah cair. 2. Menambah tempat sampah pada sekitar area UPI
2.	20 Februari 2026	"PT. Citra Raja Empat Canning Jl. Bubara Klaligi, Distrik Sorong, Sorong, Papua Barat Daya 0,87881 S - 131,25708 E (E 131°15' 23,6" - S 00° 52' 48,5").	PT. Bagus Jaya Abadi	NIB 9120007220944	Penerbita OSS		"1. 1. PT. Citraraja Empat Canning telah melakukan pemenuhan Dokumen pencegahan pencemaran. 2. Tidak ditemukan indikasi pencemaran. 3. Tidak ada indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Citraraja Empat Canning."	Taat		"1. Rekomendasi yang diberikan untuk dilaksanakan oleh PT. Citraraja Empat Canning adalah sebagai berikut: 1. Tidak adanya temuan pelanggaran. 2. Tidak ada rekomendasi tindak lanjut khusus yang diberikan."
E. SATWAS SDKP MERAUKE.										
F. SATWAS SDKP MIMIKA.										
G. WILKER RAJA AMPAT.										
H. WILKER FAK-FAK.										
I. WILKER PSDKP DOBO										



Gambar 7 Dokumentasi Pengawasan Pencemaran



2. Sasaran Kegiatan 4: Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan

Sasaran kegiatan terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan menurunkan 1 indikator kinerja utama yang ditetapkan Pangkalan PSDKP Tual yaitu "Nilai pemeriksaan pelaku usaha perikanan". IK ini mengalami perubahan nama akan tetapi mekanisme perhitungannya tetap sama dengan IK tahun sebelumnya.

a. IK 5: Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan (Nilai)

Nilai Pemeriksaan pelaku usaha sesuai prosedur adalah nilai rata – rata kualitas pemeriksaan pelaku usaha oleh Pengawas Perikanan. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan/akumulasi dari nilai tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan suatu pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan dibagi dengan jumlah pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan yang diriksa.

Pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan adalah upaya pengawasan usaha dan/atau pemanfaat sumber daya oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Formula:

$$y_{waskan} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

Keterangan:

y_1 : Nilai Kualitas pengawasan sumber daya perikanan

x_i : Nilai komponen yang tersedia

n : Jumlah komponen yang tersedia.

Dimana komponennya antara lain:

a) Nilai pemeriksaan pelaku usaha perikanan sesuai prosedur ($x_{pemeriksaan}$)

Adapun nilai tahapan pemeriksaan diberikan untuk setiap pelaku usaha berdasarkan tahapan sebagai berikut:

Tabel 12 Pemeriksaan Nilai Tahapan Sumber Daya Perikanan

No	Tahapan pemeriksaan	Nilai	Output/kriteria
1	Perencanaan	5	Surat dinas atau Dasar pelaksanaan pengawasan
		5	SPT

2	Pelaksanaan	50	Dokumen hasil pemeriksaan Pengawas Perikanan (hasil Pengawasan/ Form Pengawasan/Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK)) dan data dukung sesuai SOP/Juknis perngawasan perikanan
		20	Dokumen hasil pemeriksaan telah diverifikasi oleh verifikator Direktorat PSDP dengan ketentuan penilaian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • 20 poin: tidak terdapat catatan perbaikan; • 15 poin: terdapat catatan perbaikan administratif; • 10 poin: terdapat catatan perbaikan teknis; • 5 poin: terdapat catatan perbaikan administratif dan teknis.
3	Pelaporan	10	Laporan pemeriksaan pelaku usaha yang disampaikan ke aplikasi wasrisk atau tautan monev Gdrive Direktorat PSDP
		10	Disampaikan tepat waktu paling lambat 14 hari dari tanggal Pengawasan dan 3 hari sebelum periode pengukuran Direktorat PSDP
Jumlah Nilai		100	

a) Nilai tindak lanjut perbaikan pelaku usaha perikanan ($x_{tl_perbaikan}$):

$x_{tl_perbaikan}$

$$= \frac{\sum_{i=1}^n \text{nilai tindak lanjut pelaku usaha}}{\text{jumlah pelaku usaha yang mendapatkan rekomendasi pembinaan/perbaikan}(n)}$$

Adapun nilai untuk setiap tindak lanjut perbaikan suatu pelaku usaha sebagai berikut:

No	Kondisi	Skor
1	Seluruh rekomendasi telah dipenuhi pelaku usaha	100
2	Sebagian besar rekomendasi telah dipenuhi pelaku usaha	80
3	Hanya sebagian kecil rekomendasi yang dipenuhi pelaku usaha	60
4	Pelaku usaha tidak menjalani rekomendasi	0



Paramater nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan ($y_{kualitas_waskan}$) :

Nilai Kualitas Sangat Baik	:	>85
Nilai Kualitas Baik	:	66 - 85
Nilai Kualitas Cukup Baik	:	50 – 65
Nilai Kualitas Kurang	:	< 50

Tahun 2026 capaian IK ini berhasil dicapai dengan nilai yang baik yaitu 99,96, sebagaimana target triwulan I yang ditetapkan. Capaian dapat diraih dengan memenuhi tahapan pemeriksaan sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas. Berikut kami tampilkan capaian indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 13 Capaian IK 5

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW I	2026	TW I 2026	s/d TW I	TW I 2025
Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha perikanan	99,96	83	99,96	99,96	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja ini telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan instrumen pengawasan. Indikator kinerja ini memberikan batasan sehingga pengawasan yang merupakan tujuan utama dari organisasi ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, tidak hanya merujuk kepada kaidah pengawaan akan tetapi tertib dalam pengadministrasian.

Analisa penyebab keberhasilan yang dilaksanakan Pangkalan PSDKP Tual agar mendapatkan capaian yang sempurna dalam memenuhi IKU dimaksud antara lain:

1. Mengumpulkan informasi pendahuluan, yang bertujuan agar meminimalisir masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan misanya lokasi unit usaha, transportasi yang akan digunakan, potensi persoalan yang timbul karena pengawasan;
2. Melakukan pemantapan terhadap peraturan yang berhubungan langsung dengan objek pengawasan, dengan internalisasi peraturan maupun kebijakan terbaru yang berkaitan dengan objek pengawasan;



3. Melakukan *sharing session* dengan instansi terkait guna menyamakan persepsi dan penguasaan kondisi terhadap objek pengawasan agar pelaksanaan pengawasan lebih professional dan bertanggungjawab;
4. Memenuhi tahapan pelaksanaan sebagaimana yang termuat dalam informasi indikator kinerja, agar pelaksanaan pengawasan terstruktur serta pengukuran kinerja dapat terlaksana.

Analisa kegiatan lain yang menunjang pencapaian yaitu:

1. Briefing rutin yang dilakukan sebagai upaya dalam meneruskan informasi serta teknis pengawasan maupun isu terkini di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual, sehingga distribusi informasi menjadi merata dan pengawasan dapat dilaksanakan dengan optimal;
2. Perencanaan dan penganggaran, kegiatan tersebut erat kaitannya dengan capaian organisasi mengingat alokasi anggaran terhadap kebutuhan pengawasan dan yang menunjang pengawasan perlu direncanakan dan ditetapkan dengan perhitungan yang sesuai.

Realisasi anggaran selama triwulan I tahun 2026 untuk mendukung IK ini sebesar Rp70,444,000,- atau 10,47% dari pagu sebesar Rp393,994,000 -. Pagu tersebut merupakan pagu setelah efisiensi dilaksanakan.

a.1 Pengawasan kapal penangkap ikan

Hingga triwulan I Pangkalan PSDKP Tual belum melaksanakan pengawasan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan. Pangkalan PSDKP Tual telah melakukan pelayanan dan pengawasan terhadap kesesuaian fisik dan dokumen kapal dalam rangka penerbitan SLO dan selama kurun waktu triwulan I Pangkalan PSDKP tual telah menerbitkan 2.174 SLO dengan rincian sebagai berikut

Tabel 14 Rekapitulasi penerbitan SLO triwulan I per lokasi

No	Lokasi (UPT/Satuan/Wilker PSDKP)	Izin Pusat (>30 GT)			Izin Provinsi (11-30 GT)			Izin Provinsi (≤10 GT)			Jumlah Total			% Laik	Jumlah Kapal Laik Operasi	Jumlah Kapal Tidak Laik / SKP SLO	Jumlah Total Hasil Tangkapan
		HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO				
		D	B		D	B		D	B		D	B					
1	PANGKALAN PSDKP TUAL	65	53	53	4	-	-	-	-	-	69	53	53	100,00	53	-	978.779
2	WILKER PSDKP DOBO	264	294	283	143	92	62	-	-	-	407	386	345	89,38	345	41	4.288.381
3	WILKER PSDKP WARABAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SATUAN PSDKP SORONG	125	132	132	741	808	808	130	134	134	996	1.074	1.074	100,00	1.074	-	2.189.839
5	WILKER PSDKP SORONG SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	WILKER PSDKP RAJAAMPAT	17	17	17	-	-	-	-	-	-	17	17	17	100,00	17	-	78.209
7	SATUAN PSDKP MERAUKE	64	79	79	163	178	178	-	-	-	227	257	257	100,00	257	-	523.548
8	WILKER PSDKP ASMAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	WILKER PSDKP WANAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	SATUAN PSDKP KAIMANA	17	14	14	94	82	82	-	-	-	111	96	96	100,00	96	-	546.755
11	WILKER PSDKP FAKFAK	3	3	3	71	70	70	-	-	-	74	73	73	100,00	73	-	50.668
12	WILKER PSDKP WIMRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	SATUAN PSDKP MIMIKA	-	143	142	4	8	8	50	55	55	200	205	205	99,51	205	1	866.234
14	SATUAN PSDKP MTB	15	18	18	34	36	36	-	-	-	49	54	54	100,00	54	-	29.005
15	WILKER PSDKP KISAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	WILKER PSDKP BENJINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	570	753	741	1.254	1.274	1.244	180	189	189	2.150	2.216	2.174	98,10	2.174	42	9.551.418



Tabel 15 Rekapitulasi penerbitan SLO triwulan I per bulan

No	Bulan	Izin Pusat (>30 GT)			Izin Provinsi (11-30 GT)			Izin Provinsi (≤10 GT)			Jumlah Total			% Laik	Jumlah Kapal Laik Operasi	Jumlah Kapal Tidak Laik / SKP SLO
		HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO			
		D	B		D	B		D	B		D	B				
1	JANUARI	264	371	370	430	460	453	54	64	64	840	895	887	99,11	887	8
2	FEBRUARI	150	201	191	411	429	425	74	77	77	655	707	693	98,02	693	14
3	MARET	156	181	180	413	385	366	52	48	48	621	614	594	96,74	594	20
	JUMLAH	570	753	741	1.254	1.274	1.244	180	189	189	2.116	2.216	2.174	98,10	2.174	42



Gambar 8 Pengawasan usaha penangkapan ikan

Selain pengawasan terhadap kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan, Pangkalan PSDKP Tual juga melaksanakan pengawasan terhadap perizinan berusaha berbasis risiko subsektor penangkapan ikan. Sampai dengan triwulan I Pangkalan PSDKP Tual baru melaksanakan pengawasan terhadap 16 unit usaha subsektor penangkapan ikan sebagaimana tabel di bawah ini;

Tabel 16 Rekap pengawasan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan

No	Tanggal Pengawasan	Nama Perusahaan/Perorangan	Penanggungjawab	Lokasi	Jenis	Hasil
1	22 Januari 2026	BASO DG TATA	BASO DG TATA	Dobo	Non OSS	SIPI expired 12 Mei 2024 & Jalur III/ Denda Administratif, Paksaan Pemerintah
2	23 Januari 2026	BASO DG TATA	BASO DG TATA	Dobo	Non OSS	SIPI expired 12 Mei 2024 & Jalur III/ Denda Administratif, Paksaan Pemerintah
3	23 Januari 2026	BASO DG TATA	BASO DG TATA	Dobo	Non OSS	SIPI expired 22 Mei 2025 & Jalur III/Denda Administratif, Paksaan Pemerintah
4	23 Januari 2026	BASO DG TATA	BASO DG TATA	Dobo	Non OSS	Tidak memiliki SIPI & Jalur III/ SP1, Paksaan Pemerintah
5	23 Januari 2026	RUSDY	RUSDY	Dobo	Non OSS	SIPI expired 22 Mei 2025 & Jalur III/Denda Administratif, Paksaan Pemerintah
6	23 Januari 2026	RUSDY	RUSDY	Dobo	Non OSS	Tidak memiliki SIPI & Jalur III/ Denda Administratif, Paksaan Pemerintah
7	23 Januari 2026	RUSDY	RUSDY	Dob	Non OSS	Tidak memiliki SIPI & Jalur III/ Denda Administratif, Paksaan Pemerintah



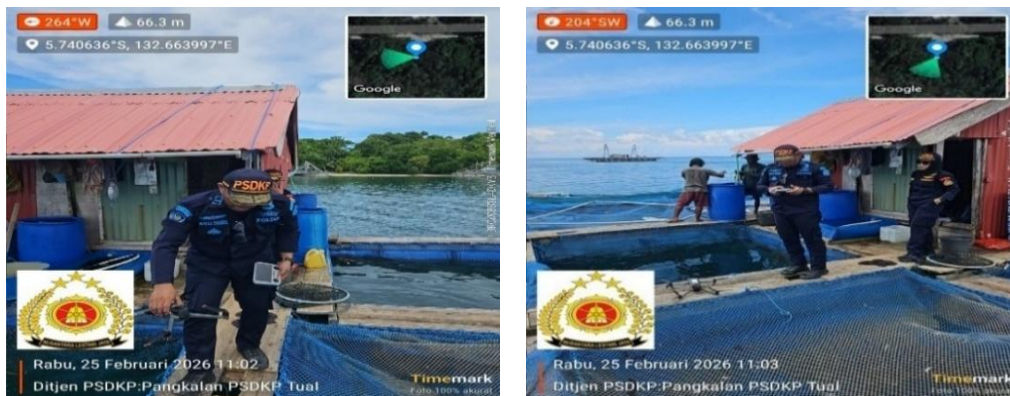
8	19 Januari 2026	RISNA	RISNA	Dobo	Non OSS	Jalur III/ Denda administratif
9	17 Januari 2026	KUSMAN	KUSMAN	Dobo	Non OSS	Jalur III/ Denda administratif
10	19 Februari 2026	ARIFIN DG NGAMBA	ARIFIN DG NGAMBA	Dobo	Non OSS	Jalur III/Denda Administratif, SP1
11	22 Januari 2026	NURYANTO	NURYANTO	Merauke	Non OSS	DPI Jalur III/Denda Administratif
12	23 Januari 2026	MUSTARI	MUSTARI	Merauke	Non OSS	DPI Jalur III/Denda Administratif, Paksaan Pemerintah penghentian Sementara Kegiatan
13	23 Januari 2026	PURWADI	PURWADI	Tual	Non OSS	DPI Jalur II/ Bukan Pelanggaran (Cuaca Buruk)
14	23 Januari 2026	PUTRI AYU MAYANGSARI	PUTRI AYU MAYANGSARI	Tual	Non OSS	Pelabuhan Pangkalan/Surat Peringatan
15	23 Januari 2026	INDRA GUNAWAN	INDRA GUNAWAN	Tual	Non OSS	Pelabuhan Pangkalan/Surat Peringatan
16	23 Januari 2026	PT. INDOMARITIM PANEN MAKMUR	PT. INDOMARITIM PANEN MAKMUR	Tual	Non OSS	DPI Jalur II/ Surat Peringatan

a.2 Pengawasan kegiatan budidaya perikanan

Pengawasan terhadap budidaya dilaksanakan selama triwulan I Tahun 2026 kepada 3 pelaku usaha yang dilakukan secara insidental. Berikut disajikan dalam tabel:

Tabel 17 Rekap pengawasan budidaya

No.	Tanggal Pengawasan	Nama Perusahaan/Perorangan	NIB	Provinsi	Kode KBLI	Dokumen Perizinan Berusaha
1.	19/01/2026	PT.RAJAWALI LAUT TIMUR	9120200616673	Papua Barat Daya	03211	NIB-Sertifikat Standar
2.	25/02/2026	PT.RAJAWALI LAUT TIMUR	9120200161673	Maluku	03211	NIB-Sertifikat Standar,PKKPRL
3.	02/03/2026	PT.JAYA SAMUDERA SIANTAN	1008230034749	Papua Barat Daya	03211	NIB,Sertifikat Standar,PKKPRL,CBIB



Gambar 9 Pengawasan budidaya

a.3 Pengawasan kegiatan Pengolahan hasil perikanan

Pengawasan terhadap pengolahan hasil perikanan dilaksanakan selama triwulan I Tahun 2026 kepada 4 pelaku usaha yang dilakukan secara insidental. Berikut disajikan dalam tabel:

Tabel 18 Rekap pengawasan pengolahan hasil perikanan

No.	Tanggal Pengawasan	Nama Perusahaan/Perorangan	NIB	Provinsi	Kode KBLI	Dokumen Perizinan Berusaha
-----	--------------------	----------------------------	-----	----------	-----------	----------------------------

1.	28/01/2026	PT.INDOPRIMA UTAMA MINA	9120001272067	Papua Barat Daya	10213	NIB,Sertifikat Standar,SKP,SPPL
2.	18/02/2026	UD.PIALA	8120118251535	Papua Barat Daya	10213	NIB-Sertifikat Standar,SKP,SPPL
3.	05/03/2026	PT.YANAGI HISTALARAYA	0220008731966	Maluku	10213	NIB,Sertifikat Standar,SKP,SPPL
4.	14/05/2026	PT.YANAGI HISTALARAYA	0220008731966	Maluku	10213	NIB,Sertifikat Standar,SKP,SPPL



Gambar 10 Pengawasan pengolahan hasil perikanan

a.4 Pengawasan kegiatan jenis ikan yang dilindungi

Pengawasan terhadap jenis ikan yang dilindungi hasil perikanan dilaksanakan selama triwulan I Tahun 2026 kepada 6 pelaku usaha yang dilakukan secara insidental. Berikut disajikan dalam tabel:

Tabel 19 Rekap pengawasan jenis ikan yang dilindungi

NO	TANGGAL	LOKASI	PELAKU USAHA	JENIS IKAN	DOKUMEN PERIZINAN	PENERBIT IZIN	URAIAN
A. PANGKALAN PSDKP TUAL							
1.	27 Februari - 2026	Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Jenis Ikan yang dilindungi dilaksanakan di Desa Labetawi, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual Dan Lokasi Keramba Jaring Apung (KJA) di Desa Dumar, Kec. Pulau Dullah Selatan Kota Tual, provinsi Maluku Kota Tual Koordinat 5,5381895LS 132,78086674BT/ 5,618960 LS 132,740872 BT	CV. Indo Marine Fish (Asrudy)	Ikan Napoleon Hidup	NIB : 9120501810162 SIPJI : I-202110131527094733780	Penerbit OSS	Telah memenuhi perizinan berusaha untuk kegiatan usaha pemanfaatan jenis ikan Napoleon (Cheilinus undulatus) dengan perlindungan terbatas dan disampaikan sosialisasi kepada pelaku usaha kedepannya untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu dengan membuat laporan realisasi kuota jika kuota pemanfaatan dari Loka PSPL Sorong sudah terbit
B. SATWAS SDKP KAIMANA							
C SATWAS SDKP MTB							
D. SATWAS SDKP MERAUKE							



2.	03 Maret 2026	Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Jenis Ikan yang dilindungi Dilaksanakan di Jalan Raya Mandala No.65 RT.017 RW. 006, Kelurahan Seringgu Jaya Merauke Papua Selatan titik Koordinat 8°29'24,64"S - 140°23'26,533"E.	CV. Bintang Papua Mahkota Utama (Fransiskus Arief Wijaya)	Ikan Arwana Irian	NIB : 9120010280123 SIPJI : 022110208205274978872	Penerbit OSS	Telah memenuhi perizinan berusaha untuk kegiatan usaha pemanfaatan jenis ikan Arwana Jardini (Scleropages Jardinii) dengan perlindungan terbatas dan disampaikan sosialisasi kepada pelaku usaha kedepannya untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu dengan membuat laporan realisasi kuota jika kuota pemanfaatan dari Loka PSPL Sorong sudah terbit
3.	04 Maret 2026	Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Jenis Ikan yang dilindungi Dilaksanakan di Jalan Dirgantara, RT/RW. 003/001, Kel. Muli, Kec. Merauke, Kab. Merauke, Prov Papua Selatan. titik Koordinat (8°318'353"LS - 140°24'20'572"BT).	CV. Flora Fauna (Bathi Wulandari)	Ikan Arwana Irian	NIB: 9120004740399 SIPJI : -	Penerbit OSS	Telah memenuhi perizinan berusaha untuk kegiatan usaha pemanfaatan jenis ikan Arwana Jardini (Scleropages Jardinii) dengan perlindungan terbatas dan disampaikan sosialisasi kepada pelaku usaha kedepannya untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu dengan membuat laporan realisasi kuota jika kuota pemanfaatan dari Loka PSPL Sorong sudah terbit
E. SATWAS SDKP SORONG							
4.	19-Februari-2026	Kegiatan pengawasan pemanfaatan jenis ikan Jl. Kapittan Pattimura, Desa/Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladum Mes, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. dengan titik Koordinat (0°54'23,72"S - 131°18'51,705"E.)	PT. Golden Eksporindo Abadi		NIB : 0811220082089 SIPJI : :20231012163727610319 6	Penerbit OSS	Berdasarkan hasil pengawasan bahwa pelaku usaha milik (PT. Golden Eksporindo Abadi) telah memiliki Perizinan Berusaha KBLI 03151 yaitu Penangkapan/pengambilan ikan bersirip (Pisces) yang dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks CITES.
F. SATWAS SDKP MIMIKA							
G. WILKER PSDKP DOBO							
5.	12 Februari 2026	Kegiatan pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilaksanakan Jl. Mayor Abdulah No. 165 RT/RW. 001/001, Kel. Galai Dubu, Kab. Kep. Aru, Maluku. dengan titik Koordinat (5°758'53.121"S - 134°238'20'728"E).	(CV.MITRA LEO GRUP)	Hiu Lanjam, Pari dan Sirip Hiu	NIB : 8120013190586 SIPJI: I- 202201272125331666 210	Penerbit OSS	Berdasarkan hasil pengawasan bahwa pelaku usaha milik (CV.MITRA LEO GRUP) telah memiliki Perizinan Berusaha KBLI 03151 yaitu Penangkapan/pengambilan ikan bersirip (Pisces) yang dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks CITES.



6.	24 Februari 2026	Kegiatan pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilaksanakan di Jl. Karim Sangaji, Kel. Galai Dubu, Kec. Pulau – Pulau Aru, Kab. Kep. Aru, Prov. Maluku	Rudy Wisman	Hiu Lanjam, Pari dan Sirip Hiu	NIB : 912020301928 SIPJI : I – 67/I/KKP/2021	Penerbit OSS	pengawasan bahwa pelaku usaha milik () telah memiliki Perizinan Berusaha KBLI 03151 yaitu Penangkapan/pengambilan ikan bersirip (Pisces) yang dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks CITES.
----	------------------	--	-------------	--------------------------------	---	--------------	--

I. WILKER PSDKP FAK-FAK



Gambar 11 Pengawasan jenis ikan yang dilindungi



3 . Sasaran Kegiatan 4 : Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif.

a. IKU 6: Indeks operasi kapal pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)

Sasaran kegiatan ke lima menghasilkan 2 Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Pangkalan PSDKP Tual diantaranya;

1. Indeks operasi kapal pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks);
2. Indeks operasi speedboat pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks);

Penjabaran sasaran kegiatan pada 3 indikator kinerja telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tugas serta fungsi Pangkalan PSDKP Tual dalam melakukan pengelolaan terhadap armada yaitu Kapal Pengawas Hiu Macan 06 dan Kapal Pengawas Hiu 14, dalam melakukan pengawasan pada WPPNRI 714, 715, dan 718

1. Indeks Operasi Kapal Pengawas digunakan untuk mengukur pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menggunakan armada kapal pengawas.
2. Indeks Operasi Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:
 - a. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan kelautan;
 - b. Cakupan wilayah pengawasan;
 - c. Hasil dan Tindak Lanjut Operasi yang terdiri dari Tangkapan Kapal Pengawas, Pemutusan Rumpon, dan/atau Sita Alkap;
 - d. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Dukungan Operasi Bersama, dan/atau Terkoordinasi, Dukungan Kegiatan SAR dan/atau Kemanusiaan, dan Dukungan Program Kegiatan Kementerian dalam Sinergi Pengawasan Kelautan dan Perikanan.
3. Kapal Pengawas adalah armada pengawasan yang terdiri dari Kelas I - V yang berada dibawah kendali Pusat (Direktorat Pengendalian Operasi Armada) dan UPT PSDKP. Jumlah Kapal Pengawas terdiri dari 34 (tiga puluh empat) unit yang tersebar di seluruh UPT PSDKP.

Formula:



$$ikp = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + X_2 + \dots + X_n)}{n}$$

$$X_i = (50\% \cdot a) + (40\% \cdot b) + (8\% \cdot c) + (2\% \cdot d)$$

Keterangan:

ikp = Indeks Operasi Kapal Pengawas

X_i = Capaian Kinerja Kapal Pengawas

n = Jumlah Kapal Pengawas

a = Variable Pemeriksaan

b = Variable Cakupan Wilayah Pengawasan

c = Variable Hasil dan Tindak Lanjut Operasi

d = Variable Dukungan Operasi Lainnya

Variable Pembentuk

1. Pemeriksaan (Bobot 50%)

- Pemeriksaan Kapal Perikanan : Bobot 70%
- Pemeriksaan Kelautan : Bobot 30%

Pemeriksaan Kelautan antara lain: [Pemeriksaan Kawasan Konservasi, WP3K, Kawasan Mangrove, Pemanfaatan Ruang Laut (Reklamasi), Pengawasan PPKT, Pencemaran SDI dan lingkungan, Sedimentasi, dll]

- Perhitungan variabel pemeriksaan dilakukan berdasarkan hari operasi yang direalisasikan.
- Setiap kapal pengawas diberikan target pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 3 (tiga) unit kapal per hari dan pemeriksaan kelautan sebanyak 1 (satu) objek per periode operasi.
- Target di atas dikecualikan untuk KP Akar Bahar yang dikhususkan untuk pengawasan sumber daya kelautan dengan target sebanyak 1 (satu) objek kelautan per hari.
- Jika kapal pengawas memeriksa 1 (satu) unit kapal perikanan asing (KIA), maka dianggap telah memenuhi target pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) unit kapal.



- Capaian pemeriksaan kapal perikanan dan pemeriksaan kelautan dapat saling melengkapi, dengan ketentuan bahwa akumulasi nilai keduanya tidak melebihi bobot maksimal yang ditetapkan, yaitu sebesar 50.

2. Cakupan Wilayah Pengawasan (Bobot 40%)

- Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan luas 1.928.506 Nm² (Sumber: BIG, 2015).
- Perhitungan variabel cakupan wilayah pengawasan dilakukan berdasarkan hari operasi yang direalisasikan.
- Masing-masing kapal pengawas diberikan target cakupan berdasarkan hari operasi. Dasar penentuan cakupan wilayah pengawasan dilakukan berdasarkan kemampuan teknis kapal, alokasi kapal setiap WPP NRI, dan faktor koreksi pelayaran.

3. Hasil dan Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 8%)

- Tangkapan Kapal Pengawas Bobot 80%
- Pemutusan Rumpon, dan/atau Sita Alkap Bobot 20%

Adapun pada masing-masing sub-variabel terdapat nilai minimum jika tidak melaksanakan kegiatan yang dimaksud. Berikut ini adalah keterangan untuk variabel Hasil dan Tindak Lanjut Target Operasi.

No.	Komponen Kinerja	Kriteria Penilaian	Nilai
1	Tangkapan Kapal Pengawas	Tidak ada Tangkapan (Nilai Minimum)	40
		Menangkap 1 – 2 KII	60
		Menangkap 3 – 5 KII	70
		Menangkap > 5 KII, atau ≥ 1 KIA, dan/atau Kapal Kelautan (KK)	80
2	Pemutusan Rumpon, dan/atau Penyitaan Alat Kapal	Tidak Melaksanakan (Nilai Minimum)	10
		Melaksanakan (≥1 kali)	20



4. Hasil Dukungan Operasi Lainnya (Bobot 2%)

- Dukungan Operasi Bersama, dan/atau Terkoordinasi : Bobot 40%
- Dukungan Kegiatan SAR dan/atau Kemanusiaan : Bobot 30%
- Dukungan Program Kegiatan Kementerian dalam Sinergi Pengawasan Kelautan dan Perikanan : Bobot 30%

*Capaian Hasil Dukungan Operasi Lainnya dapat saling melengkapi, dengan ketentuan bahwa akumulasi nilai keduanya tidak melebihi bobot maksimal yang ditetapkan, yaitu sebesar 2

No.	Komponen Kinerja	Kriteria Penilaian	Nilai
1	Dukungan Operasi Bersama, dan/atau Terkoordinasi	Tidak Melaksanakan (Nilai Minimum)	30
		Melaksanakan (≥ 1 kali)	40
2	Dukungan Kegiatan SAR dan/atau Kemanusiaan	Tidak Melaksanakan (Nilai Minimum)	20
		Melaksanakan (≥ 1 kali)	30
3	Dukungan Program Kegiatan Kementerian dalam Sinergi Pengawasan Kelautan dan Perikanan	Tidak Melaksanakan (Nilai Minimum)	20
		Melaksanakan (≥ 1 kali)	30

Keterangan:

- Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas disusun dari beberapa variabel utama yang memiliki bobot penilaian masing-masing. Setiap variabel hanya dapat dinilai sesuai dengan batas maksimal yang sudah ditentukan, sehingga nilainya tidak bisa melampaui ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, akumulasi keseluruhan capaian kinerja tetap terjaga pada nilai tertinggi yang telah ditetapkan (100), sehingga penilaian berlangsung objektif, terukur, dan proporsional.
- Untuk variabel poin 3 dan poin 4 bersifat opsional dan situasional berdasarkan penugasan dari pimpinan dan informasi lainnya yang dimuat dalam rencana operasi.
- Bagi kapal pengawas yang tidak mendapat penugasan/ tidak melaksanakan, maka hanya mendapatkan nilai minimum.



- Jika Kapal Pengawas belum atau tidak melaksanakan operasi, maka tidak diperhitungkan dalam perhitungan Indeks Operasi Kapal Pengawas.

Pada Triwulan I Tahun 2026 Pangkalan PSDKP Tual berhasil mendapat nilai capaian IK Operasi Kapal Pengawas dengan nilai yang baik yaitu 98,50 sebagaimana target rencana kinerja triwulan I sebesar 89 yang ditetapkan oleh Dit. POA untuk UPT, berbeda dengan tahun sebelumnya capaian realisasi operasi kapal pengawas dengan perhitungan rata-rata satu tahun. Berikut kami tampilkan capaian indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 20 Capaian IK 6

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW I	2026	TW I 2026	s/d TW I	TW I 2025
Indeks operasi kapal pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)	89	98,50	98,50	98,50	-



Gambar 12 Gelar operasi kapal pengawas

Jika dilihat pada tabel yang tersaji di atas maka capaian indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual pada triwulan I dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 21 Perhitungan capaian IK 6

No	Satker	Kapal Pengawas	Pemeriksaan Kapal Perikanan (70%)			Pemeriksaan Kelautan (30%)			Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (50%)			Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (45%)			Tangkapan Kapal Pengawas (80%)				Pemutusan Rumpon, Sita Alkap, dan/atau Surat Peringatan (20%)			Hasil dan Tindak Lanjut Operasi (3%)		Dukungan Operasi Bersama (40%)			Dukungan Kegiatan SAR dan/atau Kemarusaan (30%)			Dukungan Program Kegiatan Kementerian dalam Sinergi Pengawasan Kelautan dan Perikanan (30%)			Dukungan Operasi Lainnya (2%)			Total Nilai Indeks	Nilai per Satker	
			TW I			TW I			TW I			TW I			TW I				TW I			TW I		TW I			TW I			TW I								
			Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Nilai Minimum	Realisasi KII	Realisasi KIA	Nilai	Nilai Minimum	Realisasi	Nilai	Nilai	Nilai Minimum	Realisasi Pelaksanaan	Nilai	Nilai Minimum	Realisasi Pelaksanaan	Nilai	Nilai Minimum	Realisasi Pelaksanaan	Nilai	Nilai Minimum	Realisasi Pelaksanaan	Nilai				
7	Pangkalan PSDKP Tual	KP. HIU MACAN 06	36	37	71,94	4	5	37,50	50,00	0,20	0,48	45,00	40	1	0	50,00	10	0	10,00	1,80	30	0	30,00	20	0	20,00	20	0	20,00	20	0	20,00	20	0	20,00	1,4	98,20	98,50
		KP. HIU 14	30	32	74,67	2	12	180,00	50,00	0,16	0,29	45,00	40	6	0	70,00	10	0	10,00	2,40	30	0	30,00	20	0	20,00	20	0	20,00	20	0	20,00	20	0	20,00	1,4	98,80	98,50

Berdasarkan rumus yang telah dijabarkan maka dapat di hitung capaian IK Operasi Kapal pengawas pada Triwulan I sebagai berikut;

$$\text{Capaian IKU 6} = \frac{98,50}{1} = 98,50$$

Capaian indikator kinerja operasi kapal pengawas pada triwulan I memperoleh nilai baik dengan realisasi anggaran yang dicapai adalah Rp2,713,765,438, atau sebesar 20,80 % dari pagu anggaran sebesar Rp13,045,265,000, dengan realisasi hari operasi masing – masing kapal pengawas KP.Hiu Macan 06 12 hari operasi dengan 37 KII hasil riksa dan 5 pemeriksaan kelautan, serta melakukan ad hoc terhadap 1 KII sedangkan KP.Hiu 14 10 Hari operasi 32 KII hasil riksa dan 12 pemeriksaan kelautan, serta melakukan ad hoc terhadap 6 KII.

Analisa penyebab keberhasilan, capaian indikator kinerja Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual dipengaruhi beberapa faktor antara lain;

1. Pemeriksaan melebihi target yang ditetapkan. Pencapaian terhadap indeks kinerja operasi kapal pengawas salah satunya berasal dari target pemeriksaan objek kelautan dan perikanan. Kapal pengawas diwajibkan melakukan pemeriksaan terhadap 3 kapal perikanan per hari operasi dan 1 objek kelautan per periode operasi. Pemeriksaan yang melewati target menjadi salah satu aktualisasi sehingga dalam suatu periode operasi jika KP tidak mampu memenuhi target operasi dikarenakan cuaca dan faktor lainnya maka kelebihan dari target dapat menjadi semacam tabungan yang mengamankan perhitungan indeks kinerja pada komponen pemeriksaan kapal perikanan.
2. Menyusun rencana operasi yang matang dan tepat sasaran, penyusunan rencana operasi dibuat dengan memperhitungkan aspek pendukung seperti wilayah potensi pelanggaran, pemeriksaan atas aktifitas pada Kawasan konservasi maupun data analisis SPKP;
3. Melakukan pemetaan terhadap wilayah operasi berdasarkan peta kerawanan dan laporan masyarakat, terus mengupdate data kerawanan yang berbasis pelaporan maupun pemantauan;
4. Melakukan evaluasi terhadap capaian hari operasi dan hasil pengawasan yang dilakukan, hal ini dimaksudkan agar Pangkalan PSDKP Tual dapat membantu dan menilai pada saat operasi dilaksanakan apa saja yang menyebabkan kegiatan operasi tidak optimal dan dapat menentukan langkah pencegahannya.

Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan, diantara kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja adalah **Perawatan dan pemeliharaan kapal pengawas,** walaupun kegiatan tersebut merupakan indikator kinerja yang berbeda tetapi merupakan aspek yang berjalan beriringan mendorong keberhasilan indeks operasi kapal. Pelaksanaan dan penjadwalan terkait perawatan rutin, darurat, serta docking maupun pembelian suku cadang direncanakan sematang dan sesuai kebutuhan kapal pengawasan sehingga operasi dapat berjalan optimal.

b. IKU 7: Indeks operasi speedboat pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)

Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Tual merupakan indeks kinerja yang dipakai untuk mengukur optimalitas dari armada *speedboat* yang berada di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Tual dapat didefinisikan sebagai sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speedboat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif.



Indeks Kinerja Kinerja Operasional Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

1. Indeks Operasi Speedboat digunakan untuk mengukur pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menggunakan armada speedboat pengawas.
2. Indeks Operasi Speedboat terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:
 - a. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan kelautan;
 - b. Cakupan wilayah pengawasan;
 - c. Hasil dan Tindak Lanjut Operasi yang terdiri dari Tangkapan Speedboat, Pemutusan Rumpon, dan/atau Sita Alkap;

Speedboat pengawas adalah armada pengawasan Kapal Pengawas Kelas IV dan V dibawah kendali UPT PSDKP yang memiliki karakteristik pengawasan dengan jangkauan dan durasi terbatas dibandingkan dengan tipe Kapal Pengawas. Jumlah Speedboat Pengawas terdiri dari 86 (delapan puluh enam) unit yang tersebar di seluruh UPT PSDKP.

Formula:

$$isb = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + X_2 + \dots + X_n)}{n}$$

$$X_i = (50\%.a) + (45\%.b) + (5\%.c)$$

Keterangan :

sb = Indeks Operasi Speedboat

X_i = Capaian Kinerja Speedboat

n = Jumlah Speedboat

a = Variable Pemeriksaan

b = Variable Cakupan Wilayah Pengawasan

c = Variable Hasil dan Tindak Lanjut Operasi

Variabel Pembentuk

1. Pemeriksaan (Bobot 50%)

- Pemeriksaan Kapal Perikanan : Bobot 70%
- Pemeriksaan Kelautan : Bobot 30%

Pemanfaatan Ruang Laut (Reklamasi), Pengawasan PPKT, Pencemaran SDI dan lingkungan, Sedimentasi, dll]



- Perhitungan variabel pemeriksaan dilakukan berdasarkan hari operasi yang direalisasikan.
- Setiap speedboat pengawas diberikan target pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 1 (satu) unit kapal per hari dan pemeriksaan kelautan sebanyak 1 (satu) objek per periode pelaksanaan operasi.
- Jika speedboat pengawas beroperasi di daerah yang tidak terdapat objek SDK (WPPNRI-PD), maka tidak ditargetkan untuk melaksanakan riksa objek SDK dan dianggap telah memenuhi target riksa tersebut.
- Jika speedboat pengawas memeriksa 1 (satu) unit kapal perikanan asing (KIA), maka dianggap telah memenuhi target pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) unit kapal.
- Capaian pemeriksaan kapal perikanan dan pemeriksaan kelautan dapat saling melengkapi, dengan ketentuan bahwa akumulasi nilai keduanya tidak melebihi bobot maksimal yang ditetapkan, yaitu sebesar 50.
- ditetapkan, yaitu sebesar 50.

2. Cakupan Wilayah Pengawasan (Bobot 45%)

- Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan luas 1.928.506 Nm² (Sumber: BIG, 2015).
- Perhitungan variabel cakupan wilayah pengawasan dilakukan berdasarkan hari operasi yang direalisasikan.
- Masing-masing speedboat pengawas diberikan target cakupan berdasarkan hari operasi. Dasar penentuan cakupan wilayah pengawasan dilakukan berdasarkan kemampuan teknis kapal, alokasi kapal setiap WPP NRI, dan faktor koreksi pelayaran.

3. Hasil dan Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 5%)

- Tangkapan Kapal Pengawas : Bobot 80%
 - Pemutusan Rumpon, dan/atau Sita : Bobot 20%
- Alkap

*Adapun pada masing-masing sub-variabel terdapat nilai minimum jika tidak melaksanakan kegiatan yang dimaksud. Berikut ini adalah keterangan untuk variabel Hasil dan Tindak Lanjut Target Operasi:

No.	Komponen Kinerja	Kriteria Penilaian	Nilai
-----	------------------	--------------------	-------



1	Tangkapan Speedboat	Tidak ada Tangkapan (Nilai Minimum)	40
		Menangkap ≥ 1 KII atau KIA dan/atau Kapal Kelautan (KK)	80
2	Pemutusan Rumpon dan/atau Penyitaan Alat Kapal	Tidak Melaksanakan (Nilai Minimum)	10
		Melaksanakan (≥ 1 kali)	20

Pada Triwulan I Tahun 2026 Pangkalan PSDKP Tual berhasil mendapat nilai capaian IK Operasi Speedboat Pengawas dengan nilai yang baik yaitu **97,50** sebagaimana target rencana kinerja triwulan I sebesar **89** yang ditetapkan oleh Dit. POA untuk UPT, berbeda dengan tahun sebelumnya capaian realisasi operasi kapal pengawas dengan perhitungan rata-rata satu tahun. Berikut kami tampilkan capaian indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 22 Capaian IK 7

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW I	2026	TW I 2026	s/d TW I	TW I 2025
Indeks operasi Speedboat lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)	89	97,50	97,50	97,50	-



Gambar 13 Gelar Operasi Speedboat Pengawas

Jika dilihat pada tabel yang tersaji di atas maka capaian indeks kinerja operasi Speedboat pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual pada triwulan I dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 23 Perhitungan capaian IK 7

No.	Lokasi UPT	Nama Speedboat	Pemeriksaan Kapal Perikanan (70%)			Pemeriksaan Kelautan (30%)			Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (50%)	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (45%)			Tangkapan Kapal (80%)				Pemutusan Rumpon, dan/atau Sita Alkap (20%)			Hasil dan Tindak Lanjut Operasi (5%)	Total Nilai Indeks	Nilai per Satker (Rata-Rata)
			TW I			TW I				TW I			TW I				TW I					
			Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai		Target	Realisasi	Nilai	Nilai Minimum	Realisasi KII	Realisasi KIA	Nilai	Nilai Minimum	Realisasi	Nilai			
6	Pangkalan PSDKP Tual	Albacore 02	0	0	0,00		0	0,00	0,00	0,0000000	0,0000000	0,00	40	0	0	40,00	10	0	10,00	0,00	0,00	97,50
		Marlin 14	0	0	0,00		0	0,00	0,00	0,0000000	0,0000000	0,00	40	0	0	40,00	10	0	10,00	0,00	0,00	
		Napoleon 18	2	5	175,00	1	2	60,00	50,00	0,0000093	0,0000301	45,00	40	0	0	40,00	10	0	10,00	2,50	97,50	
		Napoleon 25	0	0	0,00		0	0,00	0,00	0,0000000	0,0000000	0,00	40	0	0	40,00	10	0	10,00	0,00	0,00	
		Napoleon 42	0	0	0,00		0	0,00	0,00	0,0000000	0,0000000	0,00	40	0	0	40,00	10	0	10,00	0,00	0,00	
		Napoleon 49	0	0	0,00		0	0,00	0,00	0,0000000	0,0000000	0,00	40	0	0	40,00	10	0	10,00	0,00	0,00	
		Napoleon 50	0	0	0,00		0	0,00	0,00	0,0000000	0,0000000	0,00	40	0	0	40,00	10	0	10,00	0,00	0,00	
		RIB/Sea Rider 010	2	5	175,00	2	16	240,00	50,00	0,0000093	0,0000290	45,00	40	0	0	40,00	10	0	10,00	2,50	97,50	
		Rubber Boat	3	11	256,67	1	7	210,00	50,00	0,0000139	0,0000311	45,00	40	0	0	40,00	10	0	10,00	2,50	97,50	
		Jetski 01	0	0	0,00		0	0,00	0,00	0,0000000	0,0000000	0,00	40	0	0	40,00	10	0	10,00	0,00	0,00	
		Jetski 02	0	0	0,00		0	0,00	0,00	0,0000000	0,0000000	0,00	40	0	0	40,00	10	0	10,00	0,00	0,00	

Berdasarkan rumus yang telah dijabarkan maka dapat di hitung capaian IK Operasi Kapal pengawas pada Triwulan I sebagai berikut;

$$\text{Capaian IKU 7} = \frac{97,50}{1} = 97,50$$

Capaian indikator kinerja operasi speedboat pengawas pada periode Triwulan I 2026 memperoleh nilai baik dengan realisasi anggaran yang dicapai Indeks kinerja operasi speedboat adalah sebesar Rp16,144,000,- atau 1,91 % dari total pagu yang dianggarkan sebesar Rp845,834,000,-. Capaian hari armada *speedboat* yang tersebar di seluruh satwas dan wilker Pangkalan PSDKP Tual telah melaksanakan 44 hari operasi untuk 3 armada speedboat pengawasan (sesuai target) dan melaksanakan pemeriksaan kepada 21 KII hasil risiko dan 17 objek pemeriksaan pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang masing – masing terdiri dari SP.RIB 010 16 hari operasi dengan 5 KII hasil risiko dan 8 objek pemeriksaan PWP3K, SP.Napoleon 018 14 hari operasi dengan 5 KII hasil risiko dan 2 objek PWP3K dan SP.Rubber Boat 14 hari operasi dengan 11 KII hasil risiko



dan 7 objek PWP3K. Pangkalan PSDKP Tual berada dalam kondisi performa yang siap operasi dan 1 dalam kondisi siap terbatas.berikut realisasi hari operasi armada *speedboat* lingkup Pangkalan PSDKP Tual akan kami sajikan dalam tabel berikut.

Tabel.24 Realisasi armada speedboat lingkup Pangkalan PSDKP Tual

NO	NAMA KAPAL PENGAWAS	OPS	KAPAL DIPERIKSA				DITANGKAP			KONDISI KAPAL
			KII	KIA	PWP3K	JML	KII	KIA	JML	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ALBACORE 002	-	-	-	-	-	-	-	-	SIAP OPERASI
2	RIB 010	16	5	-	8	13	-	-	-	SIAP OPERASI
3	Jetsky 01	-	-	-	-	-	-	-	-	SIAP OPERASI
4	Jetsky 02	-	-	-	-	-	-	-	-	SIAP OPERASI
5	SP. NAPOLEON 050	-	-	-	-	-	-	-	-	SIAP OPERASI
6	SP. NAPOLEON 049	-	-	-	-	-	-	-	-	SIAP TERBATAS
7	SP. NAPOLEON 018	14	5	-	2	7	-	-	-	SIAP OPERASI
8	SP. NAPOLEON 042	-	-	-	-	-	-	-	-	SIAP OPERASI
9	RUBBER BOAT	14	11	-	7	18	-	-	-	SIAP OPERASI
10	SP. NAPOLEON 025	-	-	-	-	-	-	-	-	SIAP OPERASI
11	SP.MARLIN 014	-	-	-	-	-	-	-	-	SIAP OPERASI
Jumlah		44	21	-	17	38	-	-	-	

Analisa penyebab keberhasilan capaian IKU dimaksud, diantaranya:

1. Menyusun rencana pengawasan yang matang dan tepat sasaran, rencana pengawasan dengan speedboat dilaksanakan dengan memperhitungkan data pengawasan terdahulu sebagai informasi awal dalam penetapan RO;
2. Melakukan pemetaan terhadap wilayah operasi, hal ini dimaksudkan agar memudahkan menentukan target operasi ataupun potensi wilayah pengawasan baik pengawasan perikanan maupun kelautan berdasarkan data pengawasan yang terlebih dahulu telah dilaksanakan sesuai pola dan kebiasaan pada kurun waktu tertentu, sehingga wilayah operasi dapat disesuaikan dengan wilayah potensi pelanggaran berdasarkan waktu ideal terjadinya;
3. Memenuhi kebutuhan logistik awak *speedboat* dalam menunjang kegiatan selama melaksanakan operasi, dengan melengkapi awak dengan perbekalan berupa makanan, minuman, air bersih, maupun sarana keselamatan sehingga pelaksanaan patrol lebih optimal.

Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan indeks kinerja operasi speedboat antara lain:

1. Melaksanakan perawatan dan pemenuhan suku cadang dalam menjaga performa armada. Secara teori, keberhasilan atas IKU ini bergantung kepada kelayakan operasi armada speed sehingga perlu diperhatikan komponen yang menunjang semisal performa mesin maupun suku cadang, kondisi ini akan menentukan sejauh mana perawatan dan pemeliharaan akan dilakukan;
2. Memenuhi kebutuhan logistic awak *speedboat* dalam menunjang kegiatan operasi, dengan melengkapi awak dengan perbekalan maupun sarana keselamatan sehingga pelaksanaan patrol lebih optimal;



4. Sasaran Kegiatan 5: Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan

Sasaran kegiatan ini merupakan sasaran kegiatan yang berorientasi kepada peneraan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan dan menurunkan 2 indikator kinerja utama, IKU tersebut antara lain:

1. Indeks peneraan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan;
2. Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan.

a. IK 9: Indeks peneraan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan

Indeks peneraan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan peneraan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang pada UPT Pangkalan PSDKP Tual untuk peneraan sanksi atas pelanggaran SPKP dan pelanggaran perizinan berusaha dibidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah.

Indeks Peneraan Sanksi Administratif Bidang KP dihitung berdasarkan rumus berikut:

Indeks Peneraan Sanksi Administratif Bidang KP dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$x = (0,5 \cdot x_1) + (0,5 \cdot x_2)$$

dimana x_1 dan x_2 didapat dari :

$$= \frac{(\text{jumlah penetapan sanksi administratif})}{(\text{jumlah sanksi administratif yang diproses})}$$

$$x_2 = \sum_1^n \frac{(Pa + Pb + Pc)}{n}$$

Keterangan :

x_1 : Tingkat penyelesaian peneraan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan

x_2 : Tingkat kepatuhan terhadap tahapan peneraan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan

Pa : Nilai pemenuhan tahapan perencanaan peneraan sanksi administratif

Pb : Nilai pemenuhan tahapan pelaksanaan peneraan sanksi administratif

Pc : Nilai pemenuhan tahapan pelaporan peneraan sanksi administratif

n : Jumlah kasus yang diekspose

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai indeks dengan kategori sebagai berikut :

Nilai	Kategori	Deskripsi
90 - 100	Sangat Baik	Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai sangat efektif dan berkualitas
80 - <90	Baik	Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai telah efektif
70 - <80	Cukup	Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai cukup efektif
<70	Kurang	Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai kurang efektif dan perlu perbaikan

Pangkalan PSDKP Tual memperoleh nilai 100 atas IK ini berdasarkan perhitungan di atas. Total pangkalan PSDKP Tual menetapkan 9 kasus non SPKP dan 13 kasus SPKP, dengan perolehan denda administratif sebesar Rp550.000.000,-.

Tabel 25 Capaian IK 8

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW I	2026	TW I 2026	s/d TW I	TW I 2025
Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	65	100	100	100	80

Analisa penyebab keberhasilan IKU dimaksud antara lain:

1. Melakukan internalisasi kepada setiap pengawas perikanan, awak kapal pengawas, maupun polsus PWP3K yang melaksanakan tugas agar profesional dalam melakukan pemeriksaan dan penetapan sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku, internalisasi dilakukan secara internal sebagai bagian penguatan kompetensi dan sharing session;
2. Melakukan pemeriksaan secara teliti ketika melaksanakan pengawasan baik ketika kedatangan kapal, keberangkatan kapal, pengawasan perizinan berusaha maupun pemeriksaan ketika sedang melaksanakan gelar operasi.
3. Memasang jaringan informasi eksternal yang berkontribusi sebagai laporan awal adanya pelanggaran;

Analisa kegiatan yang menunjang

1. Metode ekspose eksternal yang melibatkan berbagai pihak sehingga penetapan sanksi lebih valid dan terukur;
2. pengumpulan data pengawasan yang kredibel sehingga bukti awal dapat dikembangkan hingga adanya penetapan denda.

Realisasi anggaran yang diserap selama triwulan I terhadap kegiatan ini sebesar Rp44,804,320,- (11,63%) dari jumlah pagu setelah efisiensi sebesar Rp385,238,000,-.



Tabel. 26 Rekap peneanaan sanksi administratif non SPKP

No.	Nama Kapal (GT)	Pelaku Usaha/ Perorangan			Pemeriksa		Pelanggaran	Proses Penanganan				
		Nama	Peran	Nahkoda	Unit Kerja yang Menangani	Kapal		Rincian Pelanggaran	Jenis Sanksi Administratif	Nomor Surat Penetapan Sanksi Administratif	Tanggal Surat Penetapan Sanksi Administratif	Jumlah Denda Administratif (Rp)
1	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	21
1	BULAN PURNAMA 07	BASO DG TATO	Pemilik	SAPRI DG RAKA	Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo	-	Melakukan penangkapan ikan tidak memiliki perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan yang berlaku	Denda Administratif & Paksaan Pemerintah	B.50/DJPSDKP/PW.470/II/2026 & B.272/PSDKPLan.6/PW.110/II/2026	4 Februari 2026 & 3 Februari 2026	50.000.000	12 Februari 2026
2	BULAN PURNAMA 10	BASO DG TATO	Pemilik	KAMARUDIN	Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo	-	Melakukan penangkapan ikan tidak memiliki perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan yang berlaku	Denda Administratif & Paksaan Pemerintah	B.51/DJPSDKP/PW.470/II/2026 & B.267/PSDKPLan.6/PW.110/II/2026	4 Februari 2026 & 3 Februari 2026	50.000.000	08 Februari 2026
3	BULAN PURNAMA 17	BASO DG TATO	Pemilik	MUANG	Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo	-	Melakukan penangkapan ikan tidak memiliki perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan yang berlaku	Denda Administratif & Paksaan Pemerintah	B.52/DJPSDKP/PW.470/II/2026 & B.268/PSDKPLan.6/PW.110/II/2026	4 Februari 2026 & 3 Februari 2026	50.000.000	12 Februari 2026
4	BULAN PURNAMA 21	BASO DG TATO	Pemilik	RUDI	Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo	-	Melakukan penangkapan ikan tidak memiliki perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan yang berlaku	SP1 & Paksaan Pemerintah	B.265/PSDKPLan.6/PW.110/II/2026 & B.266/PSDKPLan.6/PW.110/II/2026	-	-	-
5	BULAN PURNAMA 30	RUSDY	Pemilik	BASIR DAENG MATTE	Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo	-	Melakukan penangkapan ikan tidak memiliki perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan yang berlaku	Denda Administratif & Paksaan Pemerintah	B.53/DJPSDKP/PW.470/II/2026 & B.269/PSDKPLan.6/PW.110/II/2026	4 Februari 2026 & 3 Februari 2026	50.000.000	08 Februari 2026
6	BULAN PURNAMA 32	RUSDY	Pemilik	SUJAYA	Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo	-	Melakukan penangkapan ikan tidak memiliki perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan yang berlaku	Denda Administratif & Paksaan Pemerintah	B.54/DJPSDKP/PW.470/II/2026 & B.270/PSDKPLan.6/PW.110/II/2026	4 Februari 2026 & 3 Februari 2026	50.000.000	08 Februari 2026
7	BULAN PURNAMA 37	RUSDY	Pemilik	ASIS DG TUNGGGA	Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo	-	Melakukan penangkapan ikan tidak memiliki perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan yang berlaku	Denda Administratif & Paksaan Pemerintah	B.55/DJPSDKP/PW.470/II/2026 & B.271/PSDKPLan.6/PW.110/II/2026	4 Februari 2026 & 3 Februari 2026	50.000.000	12 Februari 2026
8	JABAL UHUD	RISNA	Pemilik	BAHAR	Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo	-	Melakukan penangkapan ikan tidak sesuai dengan daerah penangkapan ikan yang telah ditentukan dan di jalur penangkapan ikan yang dilarang	Denda Administratif	B.56/DJPSDKP/PW.470/II/2026	04 Februari 2026	50.000.000	12 Februari 2026
9	WAWAN 01	KUSMAN	Pemilik	MARWADI	Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo	-	Melakukan penangkapan ikan tidak sesuai dengan daerah penangkapan ikan yang telah ditentukan dan di jalur penangkapan ikan yang dilarang	Denda Administratif	B.57/DJPSDKP/PW.470/II/2026	04 Februari 2026	50.000.000	12 Februari 2026
10	ALMUTAKABBIR	ARIFIN DG NGAMBA	Pemilik	ARIFIN DG NGAMBA	Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo	-	Melakukan kegiatan penangkapan ikan pada jalur III (> 12 mil) di perairan Laut Aru tidak sesuai daerah penangkapan ikan pada izin sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha	Denda Administratif & SP1	B.74/DJPSDKP/PW.470/II/2026 & B.512/PSDKPLan.6/PW.110/III/2026	26 Februari 2026 & 3 Maret 2026	50.000.000	01 Maret 2026
11	JABAL 01	ARIFIN	Pemilik	MUHAMMAD NUR	Pangkalan PSDKP Tual, Satwas SDKP Sorong	KP. HIU 14	Melakukan kegiatan alih muat (transshipment) ikan dengan kapal pengangkut yang bukan mitranya sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha yang dimiliki	SP1	B.592/PSDKPLan.6/PW.110/III/2026	10 Maret 2026	-	-
12	BERHASIL 02	RIDWAN	Pemilik	RIDWAN	Pangkalan PSDKP Tual, Satwas SDKP Sorong	KP. HIU 15	Melakukan kegiatan alih muat (transshipment) ikan dengan kapal pengangkut yang bukan mitranya sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha yang dimiliki	SP1	B.591/PSDKPLan.6/PW.110/III/2026	10 Maret 2026	-	-
13	RATU CAHAYA 01	SUARDI	Pemilik	SARIFUDIN	Pangkalan PSDKP Tual, Satwas SDKP Sorong	KP. HIU 16	Melakukan kegiatan penangkapan ikan pada Jalur III yang tidak sesuai perizinan berusaha di Perairan Laut Seram WPPNRI 715	SP1	b.594/PSDKPLan.6/PW.110/III/2026	10 Maret 2026	-	-



Tabel. 27 Rekap pengenaaan sanksi administratif SPKP

No	Tanggal	Nomor	Objek Pelaporan	Pelanggaran
1	14/01/2026	TLSA.06/PSDKPLan.6/PW.110/I/2026	Kapal Indonesia MINARAYA - 06 NO Buku Kapal 9827	Pelanggaran Pelabuhan
2	14/01/2026	TLSA.05/PSDKPLan.6/PW.110/I/2026	Kapal Indonesia PASIFIK NO Buku Kapal 9821	Pelanggaran Pelabuhan
3	20/01/2026	TLSA.03/PSDKPLan6/PW.110/I/2026	Kapal Indonesia SEJAHTERA SENTOSA NO Buku Kapal 8826	Masuk Zona Konservasi
4	20/01/2026	TLSA.03/PSDKPLan.6/PW.110/I/2026	Kapal Indonesia SEJAHTERA SENTOSA NO Buku Kapal 8826	Pelanggaran Pelabuhan
5	20/01/2026	TLSA.01/PSDKPLan.6/PW.110/I/2026	Kapal Indonesia BINTANG SUKSES MAKMUR - 8 NO Buku Kapal 3083	Beroperasi Dekat Garis Pantai
6	02/02/2026	TLSA.03/PSDKPLan.6/PW.110/II/2026	Kapal Indonesia GEMBIRA JAYA NO Buku Kapal 2768	Beroperasi Dekat Garis Pantai
7	02/02/2026	TLSA.02/PSDKPLan.6/PW.110/I/2026	Kapal Indonesia IGP 28 NO Buku Kapal 22394	Masuk Zona Konservasi
8	09/03/2026	TLSA.07/PSDKPLan.6/PW.110/III/2026	Kapal Indonesia HARLANDO PRATAMA 1 NO Buku Kapal 10337	Pelanggaran DPI
9	31/03/2026	TLSA.08/PSDKPLan.6/PW.110/III/2026	Kapal Indonesia HENG JAYA NO Buku Kapal 9944	Beroperasi Dekat Garis Pantai

b. IK 10: Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan

Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja dalam pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan yang mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran.

Formula :

$$x = \sum \left(\frac{X_1 + X_2 + X_n}{n} \right)$$

x : Pemeriksaan hasil analisis pemantauan SDKP ;

x_1, x_2, x_n : Jumlah pelanggaran yang sudah dilakukan tindak lanjut analisis lanjutan pengenaaan sanksi administratif SPKP

n : Jumlah hasil analisis SPKP yang telah dilakukan pemeriksaan lanjutan

dengan kriteria indeks

Nilai	Kategori	Deskripsi
90 - 100	Sangat Baik	Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai sangat efektif dan berkualitas
80 - <90	Baik	Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai telah efektif
70 - <80	Cukup	Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai cukup efektif
<70	Kurang	Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai kurang efektif dan perlu perbaikan

Selama triwulan I tahun 2026 Pangkalan PSDKP Tual telah melakukan pemeriksaan terhadap 9 dugaan pelanggaran SPKP menurut data pemantauan yang dilakukan oleh tim pusdal. Data dugaan tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Pangkalan PSDKP Tual dengan melakukan pemeriksaan terhadap nakhoda maupun pemilik. Berikut hasil tindak lanjut tersebut kami sampaikan dalam bentuk tabel.

Tabel 28 Rekapitulasi SPKP

NO	UPT	HASIL ANALISIS PUSDAL (INDIKASI PELANGGARAN)								ANALISIS LANJUTAN		TINDAK LANJUT						Capaian Pengenaan Sanksi Administratif KP SPKP	
		TRANSHIPMENT	PELABUHAN PANGKALAN	DPI	JALUR (<12 NM)	ZONA KONSERVASI	POACHING	SIPIEXPIRED	JUMLAH	DALAM PROSES	SUDAH	SURAT PEMANGGILAN	BUKAN PELANGGARAN	BAP	SP1	SP2	DENDA	%	Kriteria indeks (melihat tabel)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
6	Tual	0	2	0	9	2	0	0	13	0	13	9	1	2	1	0	0	100,00%	82
	Total	0	2	0	9	2	0	0	13	0	13	9	1	2	1	0	0	100,00%	82

$$x = \sum \frac{(X_1+X_2+X_n)}{n} \times 100\% = \frac{(13)}{13} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel di atas maka Pangkalan PSDKP tual memperoleh capaian triwulan I sebesar 100 dari target triwulan I yang ditetapkan sebesar 65. Berikut kami sampaikan data capaian indikator kinerja dimaksud dalam bentuk tabel.

Tabel 29 Capaian IK 9

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW I	2026	TW I 2026	s/d TW I	TW I 2025
Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	65	100	100	100	80

Analisis penyebab keberhasilan disebabkan antara lain:

1. Pangkalan PSDKP Tual menindaklanjuti dengan melaksanakan BAP kepada pelaku usaha yang terindikasi melakukan pelanggaran dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu;
2. Pangkalan PSDKP Tual memanfaatkan aplikasi online dalam hal ini zoom meeting agar mempermudah proses permintaan keterangan terhadap pemilik yang berdomisili di luar wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual.

Analisa kegiatan yang menunjang tercapainya indikator kinerja dimaksud adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan tindaklanjut kapal yang diindikasikan melakukan pelanggaran. Pangkalan PSDKP Tual secara kontinu terus melakukan pemanggilan klarifikasi maupun berkoordinasi kepada UPT PSDKP lainnya agar proses permintaan keterangan dapat berjalan dengan lancar.

5. Sasaran kinerja 8: Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Sasaran kinerja ini menurunkan 10 indikator kinerja manajerial yang telah ditetapkan Pangkalan PSDKP Tual dalam perjanjian kinerja Tahun 2026. 10 indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja yang melekat pada kegiatan penatausahaan dan merupakan kerja administrasi keseharian diantaranya;

1. Nilai kinerja perencanaan anggaran satker Pangkalan PSDKP Tual (nilai);
2. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satker lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai);
3. Indeks profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Tual (indeks);
4. Penilaian mandiri SAKIP satker Pangkalan PSDKP Tual (nilai);
5. Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko Pangkalan PSDKP Tual (%);
6. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%);
7. Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai);
8. Nilai pengawasan kearsipan internal Pangkalan PSDKP Tual (nilai);
9. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Tual (inovasi);
10. Nilai implementasi program budaya kerja (nilai).

Selama kurun waktu triwulan I Pangkalan PSDKP Tual melakukan penilaian terhadap 3 indikator kinerja manajerial yang dinilai secara triwulan yaitu pada point 5, 6, dan 7 sedangkan realisasi seluruh kegiatan dukungan manajemen selama triwulan I sebesar Rp 4,870,775,250,- atau sekitar 25,76 % dari total pagu RP18,910,895,000,-

a. IK 16: Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Tual (%)

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan



anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

Formula:

$$X = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan:

- X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko
- a = Jumlah Form Pemantauan Manajemen Risiko
- b = Jumlah Form Identifikasi Manajemen Risiko

Pangkalan PSDKP Tual telah melakukan pengendalian resiko dan dipantau oleh tim sesdit terkait kelengkapan data dukung dan tahapan pengendalian. Capaian yang diperoleh Pangkalan PSDKP Tual **sebesar 100 dari target 100 pada triwulan I tahun 2026** dengan merealisasikan 15 pengendalian risiko dari 15 rencana dengan perhitungan sebagai berikut

$$X = \frac{15}{15} \times 100\% = 100\%$$

Pencapaian ini dikarenakan seluruh tahapan resiko pada Pangkalan PSDKP Tual telah dilaksanakan dan telah terdokumentasikan serta telah diverifikasi (lampiran II). Capaian indikator kinerja ini kami sajikan dalam tabel berikut.

Tabel 30 Capaian IK 16

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW I	2026	TW I 2026	s/d TW I	TW I 2025
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Tual (%)	100	100	100	100	100

Analisa penyebab keberhasilan kegiatan ini antara lain:

1. Setiap tim kerja mengidentifikasi setiap skala resiko yang kemungkinan bisa terjadi dalam rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam triwulan berjalan dan dituangkan dalam form kendali yang mendapat perhatian dan arah pimpinan;
2. Menentukan langkah pencegahan yang dilakukan untuk meminimalisir resiko tersebut;

Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah evaluasi, kegiatan organisasi berjalan seirama sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan sebagai acuan kerja. Kegiatan yang sama akan berjalan terus sehingga peran evaluasi akan memberikan gambaran terhadap rencana dan pencegahan kedepan atas dasar evaluasi kegiatan sebelumnya.

b. IK 17: Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

Jumlah rekomendasi **hasil pengawasan Itjen** yang telah ditindaklanjuti **secara tuntas** (status tindak lanjut adalah **TUNTAS**) oleh Unit Kerja Level 2. Data capaian berdasarkan Nota Dinas Capaian dari Inspektorat Jenderal. Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti **secara tuntas** (status tindak lanjut adalah **TUNTAS**) sebanyak **86%** dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran.

$$\text{Jml Rekomendasi} = (\Sigma N_t) / (\Sigma N) \times 100\%$$

Keterangan:

ΣN_t = Rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Level 2

ΣN = Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada Unit Kerja Level 2

Tabel 31 Capaian IK 17

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW I	2026	TW I 2026	s/d TW I	TW I 2025
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	86%	86%	86%	86%	100%

Selama triwulan I tahun 2026 capaian IKU Presentase jumlah hasil rekomendasi pengawasan Pangkalan PSDKP Tual belum memiliki rekomendasi hasil dari pemeriksaan Itjen KKP sehingga capaian menggunakan nilai target yaitu 86 % yang sebagaimana disampaikan dalam surat nomor 846/DJPSDKP.1/TU.140/IV/2026 (lampiran III), dengan perhitungan sebagai berikut:



$$\text{Jumlah Rekomendasi} = \frac{73}{73} \times 100\% = 100\%$$

Analisa penyebab keberhasilan yang mendukung capaian ini adalah mendelegasikan pihak yang bertanggung jawab jika terdapat rekomendasi untuk ditindaklanjuti, dan pimpinan yang proaktif untuk memantau sejauh mana progress tindak lanjut sudah diselesaikan.

Analisa kegiatan yang menunjang adalah kegiatan monitoring internal setelah rekomendasi disampaikan, yang dipimpin langsung oleh kasubag umum agar tindak lanjut dapat segera disampaikan.

a. **IK 18: Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai)**

Nilai Kepuasan Masyarakat adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui survei secara kuantitatif dan komprehensif terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengambilan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017. Survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (*trend*) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada Masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Pelaksanaan Survei dilakukan setiap triwulan oleh seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ditjen PSDKP menggunakan aplikasi SI SUSAN (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat KP). Penentuan nilai ditetapkan setelah dilakukan verifikasi dan validasi level eselon I yang dilaksanakan 8 s.d 10 hari di triwulan berikutnya.

Nilai mutu pelayanan diukur melalui sistem informasi survei kepuasan Masyarakat (*tools* SKM atau SI-SUSAN) atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KKP sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2021. Penilaian dilakukan atas seluruh responden KKP mencakup 9 unsur pelayanan antara lain U1-Persyaratan Layanan⁽¹⁾, U2-Kemudahan Prosedur⁽²⁾, U3-Waktu Penyelesaian⁽³⁾, U4-Kesesuaian Biaya⁽⁴⁾, U5-Kesesuaian Produk⁽⁵⁾, U6-Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas⁽⁶⁾, U7-Kemudahan Fitur/Perilaku Petugas⁽⁷⁾, U8-Layanan Konsultasi⁽⁸⁾, dan U9-Kualitas Isi/Sarana⁽⁹⁾.

SLO (Standar Laik Operasi) Kapal Perikanan merupakan kegiatan pelayanan publik yang ada di Lingkup Pangkalan PSDKP Tual. Survei kepuasan masyarakat dilakukan kepada pengguna jasa di Pangkalan PSDKP Tual maupun satwas dan wilker selama kurun waktu triwulan I dan diperoleh nilai 98,32 dari target 88,8 (lampiran IV). Berikut kami sampaikan tabel capaian perhitungan indikator kinerja dimaksud.

Tabel 32 Capaian IK 18

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW I	2026	TW I 2026	s/d TW I	TW I 2025
Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	98,32	88,8	98,32	93,22	100

Analisa penyebab keberhasilan pencapaian IKU dikarenakan beberapa faktor antara lain:

1. Pengawas perikanan sebagai garda terdepan dalam pelayanan SLO telah melaksanakan kegiatan sebagaimana yang diamanatkan UU dan telah memenuhi etika pelayanan publik sehingga pengguna jasa menerima manfaat pelayanan dengan baik;
2. Pengguna jasa telah mendapatkan fasilitas, yang nyaman selama bermitra baik dalam penggunaan aplikasi yang memudahkan seperti e-SLO ataupun ruang tunggu yang nyaman;
3. Keterbukaan informasi terkait prosedur penerbitan ataupun kendala yang mengakibatkan SLO tidak dapat diterbitkan disampaikan dengan baik kepada pengguna jasa.

Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain

1. Perawatan Gedung, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai adalah salah satu aspek yang secara langsung berdampak kepada kenyamanan para pengguna jasa;
2. Penggunaan aplikasi e-SLO yang mempermudah permohonan keberangkatan kapal perikanan;
3. Internalisasi nilai ASN Ber-AKHLAK kepada para Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K melalui kegiatan apel pagi sehingga memupuk kesadaran dan aktualisasi dalam melaksanakan pelayanan.

C. Realisasi Anggaran

Anggaran yang dikelola Pangkalan Pengawasan SDKP Tual pada Tahun 2026 sesuai DIPA Nomor: **SP DIPA- 032.05.2.440853/2026** tanggal 29 Desember 2025, mendapat alokasi dana pagu RM sebesar Rp.**38.899.623.000,-** Sampai dengan akhir triwulan I tahun 2026 Pangkalan PSDKP Tual telah memiliki realisasi sebesar Rp.**7,419,933,574** atau 19,07 % berdasarkan data *Myintress*.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Selama triwulan I Tahun 2026, kinerja Pangkalan PSDKP Tual telah mencapai hasil yang baik. Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Program, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Pada Tahun 2026, terdapat 21 Indikator Kinerja dimana 11 merupakan IKU dan 10 IKM yang menjadi komitmen kinerja UPT Pangkalan PSDKP Tual. Pencapaian IK triwulan I tahun 2026 dengan nilai NKO sebesar 114,83 diperoleh terhadap penilaian 9 Indikator Kinerja, 6 IK berstatus biru (istimewa) 3 IK lainnya berstatus hijau (baik).

B. Saran dan Rekomendasi

Memperhatikan analisis capaian kinerja sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya dan dalam rangka upaya untuk meningkatkan kinerja Pangkalan PSDKP Tual pada periode triwulan II Tahun 2026. Saran dan Rencana untuk memperbaiki capaian IKU pada Tahun 2026 terangkum dalam Tabel berikut :

Tabel 33 Saran dan Rencana Tindak Lanjut atas pencapaian kinerja Pangkalan PSDKP Tual Periode Triwulan I 2026

No	Saran	Rencana Aksi	Waktu
1	Melaksanakan kontrol terhadap capaian IK IP ASN	<ul style="list-style-type: none">• Mengadakan kroscek data berdasarkan capaian IP ASN pada aplikasi berbasis web.• Melakukan penyampaian melalui WAG agar setiap pegawai dapat memenuhi kewajiban dalam pemenuhan IP ASN	<ul style="list-style-type: none">• Triwulan II
2	Melaksanakan kontrol terhadap capaian IKPA Pangkalan PSDKP Tual	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan rapat evaluasi	<ul style="list-style-type: none">• Triwulan II

PANGKALAN PSDKP TUAL

Jalan Bukit Dumar No.1 Kompleks PPN Tual
Kota Madya Tual Kecamatan Dullah Selatan
Provinsi Maluku - 97611